

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**BANTUAN PERALATAN PENGOLAHAN HASIL
PERIKANAN TERHADAP PRODUKSI KERUPUK IKAN
PADA SENTRA PENGOLAHAN DI DESA PIASAK
KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SUKIMAN

NIM: 016759368

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **“Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Terhadap Produksi Kerupuk Ikan Pada Sentra Pengolahan Di Desa Piasak Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu”** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Putussibau, 11 April 2014

Yang Menyatakan



SUKIMAN
NIM 016759368

ABSTRAK

Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Terhadap Produksi Kerupuk Ikan Pada Sentra Pengolahan di Desa Piasak Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu

Sukiman

Sukimans2ut@gmail.com

Universitas Terbuka

Kata Kunci: Bantuan Peralatan, Produksi Kerupuk ikan

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu fokus dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2012 mencapai 29,13 juta jiwa. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat pengolah hasil perikanan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pemberian bantuan peralatan kepada kelompok masyarakat di Desa Piasak Kecamatan Selimbau dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hasil pemanfaatan bantuan peralatan pengolahan di Desa Piasak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pemberian bantuan peralatan pengolahan di Desa Piasak terdapat 3 (tiga) tahap yaitu: 1. Tahap Pra-implementasi 2. Tahap Implementasi dan 3. Tahap Pasca Implementasi. Pada proses pemberian bantuan telah dilakukan sesuai dengan ketentuannya tetapi pada bantuan peralatan pengolahan terhadap produksi kerupuk ikan di Desa Piasak belum menunjukkan hasil yang positif. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya produksi kerupuk ikan di Desa Piasak yang disebabkan oleh semakin mahalnya bahan baku baik itu bahan baku ikan maupun bahan baku tepung tapioka dan disebabkan juga oleh belum maksimalnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan kepada kelompok pengolah Desa Piasak seperti peralatan penyimpanan bahan baku ikan.

Kata Kunci: Bantuan Peralatan, Produksi Kerupuk ikan

ABSTRACT

The Assistance of Fishery Products Processing Equipment toward Production of Fish Crackers at Processing Center in the Piasak Village, Selimbau District, Kapuas Hulu Regency

Sukiman

Sukimans2ut@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Poverty alleviation in coastal areas and fisheries centers is one of the focuses in the implementation of marine and fisheries development. Based on data from the Central Statistics Agency or Badan Pusat Statistik (BPS), the number of poor people in September 2012 reached 29,13 million. Most of this amount is marine communities and fisheries, including the processing of fishery products community. Poverty is the main national problem which can not be delayed its overcome and should be given highest priority in the implementation of social welfare development. The purpose of the research is to know the giving process of the equipment assistance to community groups in Piasak Village, Selimbau District and to know the factors that influence the effectiveness of the results in utilizing the assistance processing equipment in Piasak Village. This research uses qualitative research. The result of the research shows that in the giving process of the assistance of processing equipment consist of 3 (three) stages : 1. Pre-Implementation phase, 2. Implementation Phase and 3. Post-Implementation Phase. The Process in giving assistance have been performed accordance with its regulations, but The assistance of processing equipment does not show the positive result toward fish crackers production in Piasak Village. This matter is marked by decreasing production of fish crackers in piasak village that caused by increasing price of raw material such as fish raw material and tapioca flour raw material that becomes more and more expensive. It is also caused by not maximal assistance performed by the Regency Government through Fisheries Service to processor group in Piasak Village such as fish raw material storage equipment.

Keyword: Assistance Equipment, Production of Fish Crackers

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Terhadap
Produksi Kerupuk Ikan Pada Sentra Pengolahan Di Desa
Piasak Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu

Penyusun TAPM : Sukiman
NIM : 016759368
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Jum'at/11 April 2014

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Netty Herawati, M.Si
NIP. 19651029 199002 2 001

Pembimbing II,



Dr. Maman Rumanta, M.Si
NIP. 19630509 198903 1 002

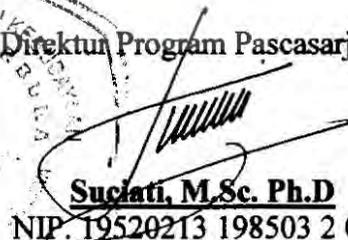
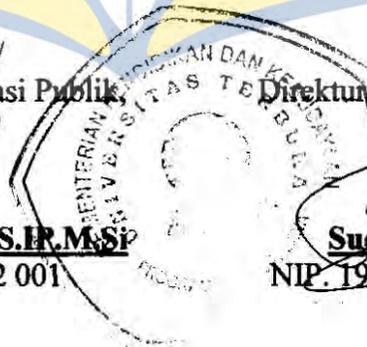
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu /
Program Magister Administrasi Publik,



Florentina Ratih Wulandari, S.IR.M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana,



Sucati, M.Sc. Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Sukiman
NIM : 016759368
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Terhadap
Produksi Kerupuk Ikan Pada Sentra Pengolahan Di Desa Piasak
Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 11 April 2014

Waktu : 15.00 – 17.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Ir. Edward Zubir, MM

Penguji Ahli :

Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc

Pembimbing I :

Dr. Netty Herawati, M.Si

Pembimbing II :

Dr. Maman Rumanta, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan TAPM. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Netty Herawati, M.Si dan Bapak Dr. Maman Rumanta, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan TAPM ini.

Ucapan dan penghargaan yang sama disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed.Ph.D.;
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Suciati, M.Sc.Ph.D.;
3. Ketua Bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Florentina Ratih Wulandari, S.IP.M.Si.;
4. Kepala UPBJJ-UT Pontianak Ir. Edward Zubir, MM.;
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya selama saya menempuh perkuliahan Program Pasca Sarjana Bidang Administrasi Publik;
6. Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir, SH yang telah memberikan saya kesempatan ijin belajar untuk menempuh Program Pasca Sarjana;
7. Seluruh informan yang telah banyak membantu dan tidak keberatan dalam memberikan informasi guna penyusunan penelitian ini;
8. Orang tua, adik-adik dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan materil dan moral;
9. Istriku tercinta “Jamilah, A.md.Kep” dan permata hatiku “Putri Alyaa Jahraa” yang selama ini telah setia mendampingi dalam senang dan susah serta selalu memotivasi selama menempuh perkuliahan.
10. Plt. Kepala Dinas Perikanan Ir. Rismawati dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Wajidi M. Ali, STP serta rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan motivasinya selama ini;
11. Sahabat-sahabat penulis satu angkatan yang telah banyak membantu dan memotivasi dalam penyelesaian TAPM ini;

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis meminta

maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan TAPM ini. Maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan guna perbaikan demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Putussibau, April 2014

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian.....	19
1. Implementasi	19
2. Kebijakan.....	20
3. Implementasi Kebijakan.....	22
4. Efektifitas.....	27
5. Evaluasi.....	31
B. Usaha Perikanan.....	35
C. Pengolahan Hasil Perikanan.....	37
D. Prinsip Dasar Pengolahan Ikan.....	38
E. Kerupuk.....	40
1. Pengertian.....	40
2. Bahan baku Kerupuk Ikan.....	43
3. Proses Pembuatan Kerupuk Ikan.....	45
4. Pengemasan.....	46
5. Peralatan.....	47
F. Tenaga Kerja.....	48
G. Perilaku Sosial Masyarakat.....	49
H. Kerangka Pemikiran.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi penelitian.....	54
C. Data dan Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan data.....	56
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	60
F. Kehadiran Peneliti.....	62

G. Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
B. Proses Pemberian Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan di Desa Piasak.....	71
1. Tahap Pra-implementasi.....	71
2. Tahap Implementasi.....	75
3. Tahap Pasca Implementasi.....	88
C. Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pemanfaatan Peralatan Bantuan di Desa Piasak.....	98
1. Fasilitas Produksi.....	98
2. Peralatan	102
3. Bahan baku.....	106
4. Tenaga kerja.....	109
5. Teknologi	109
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	111
A. Simpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan	
Lampiran 4. Ijin Penelitian	
Lampiran 5. SK Bupati Kapuas Hulu tentang Sentra	
Lampiran 6. Grand Desain Sentra Piasak	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Data nelayan Kapuas Hulu tahun 2012.....	5
1.2. Data Pembudidaya Ikan di Kabupaten Kapuas Hulu 2012.....	7
1.3. Persentase rumah tangga Nelayan dan Pembudidaya menurut rata-rata luas lantai per anggota rumah tangga di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012.....	9
1.4. Persentase rumah tangga menurut jenis lantai yang dipergunakan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012.....	10
1.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012.....	11
1.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012.....	11
1.7. Daftar Bantuan Peralatan di Desa Piasak Tahun 2010 s/d 2012.....	13
1.8. Daftar peralatan bantuan melalui program PUMP-P2HP Tahun 2011.....	15
1.9. Produksi Kerupuk Ikan di Desa Piasak tahun 2009 s/d 2012.....	16
4.1. Jumlah Penduduk Desa Piasak Berdasarkan Usia.....	69
4.2. Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	71
4.3. Pra-Implementasi Pemberian Bantuan Peralatan.....	74
4.4. Proses pelaksanaan pemberian bantuan peralatan Pengolahan kerupuk ikan di Desa Piasak yang teridentifikasi.....	82
4.5. Daftar Pegawai pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.....	85
4.6. Produksi Kerupuk ikan di Desa Piasak tahun 2009 s/d 2012.....	93
4.7. Bantuan Peralatan Dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk pengolah Desa Piasak dari tahun 2010 s/d 2012.....	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Alat Sederhana pencetak, pengukus, pemotong dan pengemas kerupuk ikan.....	45
2.2. Kerangka Pemikiran.....	51
3.1. Teknik Analisa Data.....	67
4.1. Peralatan bantuan Dinas Perikanan.....	106



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lam. 1 Pedoman Wawancara.....	115
Lam. 2 Transkrip Wawancara.....	117
Lam. 3 Dokumentasi Kegiatan.....	122
Lam. 4 Ijin Penelitian.....	128
Lam. 5 SK Bupati Kapuas Hulu tentang Penetapan Lokasi Khusus (LOKUS) Sentra Pengolahan Hasil Perikanan.....	129
Lam. 6 Grand Desain Sentra Piasak.....	131



BIODATA

Nama : SUKIMAN, S.Pi
NIM : 016759368
Tempat dan Tanggal Lahir : SIMPANG MAS, 10 PEBRUARI 1980
Registrasi Pertama : 2011.2
Riwayat Pendidikan : 1. SDN No. 28 Sungai Rengas Tamat Tahun 1993;
2. SMPN No. 15 Pontianak Tamat Tahun 1996;
3. SMK Muhammadiyah Pontianak Tamat Tahun 1999;
4. Universitas Muhammadiyah Pontianak Tahun 2001 s/d 2005.
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2006 Kerja Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu s/d Sekarang
Alamat Tetap : Jl. Pasentren Kelurahan Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu
Telp/HP : 085654465558



Putussibau, April 2014



Sukiman, S.Pi
NIM. 016759368

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu fokus dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2012 mencapai 29,13 juta jiwa. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat pengolah hasil perikanan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan yang menyebabkan kemiskinan berkaitan dengan kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial, tidak memiliki aset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan termasuk kelompok pengolah hasil perikanan. Potensi perikanan laut Indonesia sangat besar dan beragam namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi lestari sumber daya ikan (SDI) laut

Indonesia mencapai sekitar 6,26 juta ton per tahun atau 7% dari total potensi lestari SDI laut dunia dengan tingkat pemanfaatan oleh nelayan pada tahun 2011 mencapai 5,6 juta ton.

Sektor perikanan sebagai salah satu pendukung sektor ekonomi memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu memberikan nilai tambah dan mempunyai nilai strategis, serta dapat memberikan manfaat finansial maupun ekonomi, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Sejauh ini, pembangunan perikanan yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang nyata dan positif terhadap pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan terhadap PDB Nasional yang terus meningkat. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDB Nasional mencapai sekitar 12,4%. Melihat keadaan sumberdaya Perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia, maka ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara seksama, yaitu bagaimana dapat memberdayakan masyarakat pesisir tersebut agar bisa dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan (*Sustainability*), karena sumberdaya perikanan, terutama ikan merupakan sumber gizi bagi masyarakat.

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di hulu sungai kapuas, merupakan sentra nelayan dan penangkapan ikan terutama dengan skala kecil-menengah dan memiliki potensi yang cukup besar sebagai penghasil produk olahan hasil perikanan. Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai wilayah seluas 31.162,00

Km², atau setara dengan 20.33 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Secara Geografis wilayah tersebut terletak di sebelah Timur Provinsi Kalimantan Barat. Dibagian sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia) dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. (Sumber: Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu 2012).

Luas perairan umum Kabupaten Kapuas Hulu (sungai dan danau) sekitar 450.257 Ha atau 3.27 % dari luas perairan umum Indonesia (13.3 Juta Ha). Terdapat 115 buah danau dengan luas 120.000 Ha. Keanekaragaman jenis flora dan fauna kawasan ini cukup tinggi, terdapat 242 jenis ikan, diantaranya jenis-jenis ikan ekonomis penting seperti Arwana (*Scleropages formosus*), Gabus (*Ophiocephalus striatus*), Jelawat (*Leptobarbus hoeveni* Blkr), Toman (*Ophiocephalus micropeltes*), Belida (*Notopterus chitala* Betutu (*Oxyeleotris marmorata* BLkr), Botia/ulang uli (*Botia macracantha*). Khusus di sungai Kapuas dapat dijumpai ikan Semah (*Tor* sp) dan Tengadak (*Schwanenfeldii* sp). (Sumber: Data statistik Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2012).

Terdapat 117 Rukun Nelayan, 5.467 KK, 10.175 Jiwa nelayan penangkap, 2.340 jiwa masyarakat pengolah hasil perikanan dan 16.852 jiwa pembudidaya. Produksi perikanan Kabupaten Kapuas Hulu pada dua tahun terakhir berturut-turut tahun 2010; 12.408,97 ton dan tahun 2011 ; 33.837.09 ton, yang berasal dari perikanan tangkap dan perikanan hasil budidaya. Ikan-

ikan tersebut dipasarkan dalam bentuk hidup, segar dan olahan. Jumlah masyarakat pengolah hasil ikan yang secara terus menerus atau sebagai mata pencaharian menetap tidak kurang dari 2.340 jiwa dan pengolah musiman tidak kurang dari 1.200 jiwa. Hasil olahan yang diproduksi secara menetap atau setiap hari dengan produksi yang relatif stabil adalah kerupuk kering dan kerupuk basah, sedangkan produk olahan yang produksinya bersifat fluktuatif atau musiman adalah ikan asin, ikan asap dan beberapa jenis peda.

Walaupun potensi yang ada cukup besar, namun pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak menghadapi permasalahan-permasalahan, terutama yang menyangkut sarana dan prasarana, modal, sumber daya manusia dan pendanaan. Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi nelayan dan Pembudidaya di Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan 1.2.



Tabel 1.1 Data nelayan Kapuas Hulu tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Nelayan
1	Putussibau Utara	28.416	0
2	Putussibau Selatan	18.942	1
3	Bika	6.567	60
4	Kalis	14.123	0
5	Mentebah	10.430	0
6	Boyan tanjung	12.560	76
7	Pengkadan	8.923	0
8	Hulu gurung	13.750	0
9	Seberuang	10.732	0
10	Semitau	8.323	149
11	Suhaid	9.266	1.433
12	Selimbau	14.454	2.782
13	Jongkong	10.933	2.454
14	Bunut hilir	9.139	1.446
15	Bunut hulu	12.408	0
16	Embaloh hilir	5.598	1.183
17	Embaloh hulu	5.697	0
18	Batang lupar	5.679	358
19	Badau	6.317	0
20	Empanang	3.229	0
21	Puring kencana	2.520	0
22	Silat hilir	17.893	233
23	Silat hulu	11.407	0
	Jumlah	247.306	10.175

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu (2013)

Nelayan dapat dibedakan menjadi tiga bagian: *Pertama* Nelayan Penuh adalah nelayan yang seluruh waktu kerjanya dipergunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan; *Kedua* Nelayan Sambilan Utama adalah nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya dipergunakan untuk

melakukan operasi penangkapan ikan; *Ketiga* Nelayan Sambilan tambahan adalah nelayan yang sebagian kecil dari waktu kerjanya dipergunakan untuk melakukan operasi penangkapan (Ditjenkan 1999). Dari pembagian nelayan tersebut diatas di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat dua bagian nelayan yaitu nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan.

Kondisi nelayan di Kabupaten Kapuas Hulu dari segi kehidupan juga relatif mapan tidak ada nelayan yang dikategori miskin. Khususnya Nelayan yang ada di Desa Piasak umumnya sudah memiliki penghasilan minimal Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)/bulan (Kabid Pengelolaan Perairan 2013). Nelayan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu berbeda jauh dengan kondisi nelayan yang ada di daerah pesisir yang selalu diidentikkan dengan kemiskinan, karena mereka pada umumnya berada pada daerah kumuh.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari sudut ekonomi saja karena kemiskinan ternyata berkaitan dengan berbagai aspek, diantaranya aspek sosial budaya, bahwa persoalan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan budaya. Dari sudut ini, kita dapat melihat bahwa budaya turut ambil bagian dalam membuat seseorang menjadi miskin.

Tabel 1.2 Data Pembudidaya Ikan di Kabupaten Kapuas Hulu 2012

No	Kecamatan	Jumlah Pembudidaya	Luas area budidaya (Ha)	
			Kolam	Keramba/KJA
1	Putussibau Utara	312	8,9	2,5
2	Putussibau Selatan	258	9,7	2,04
3	Bika	273	3,2	3,06
4	Kalis	480	9,2	1,06
5	Mentebah	390	6,7	0
6	Boyan tanjung	340	15,7	0
7	Pengkadan	450	14,7	0
8	Hulu gurung	324	22,9	0
9	Seberuang	140	11,5	0
10	Semitau	1.547	11,2	6,8
11	Suhaid	1.628	12,3	5
12	Selimbau	3.906	9,2	13,64
13	Jongkong	1.683	7,3	9,81
14	Bunut hilir	941	3,3	6,55
15	Bunut hulu	270	17,5	0
16	Embaloh hilir	452	2,3	4,25
17	Embaloh hulu	152	4,3	0
18	Batang lupar	1.336	7,9	3,6
19	Badau	1.212	5,5	5,68
20	Empanang	90	5,8	0
21	Puring kacaña	85	3,7	0
22	Silat hilir	469	3,5	1,5
23	Silat hulu	114	5,3	0
Jumlah		16.852	201,6	65,49

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu (2013)

Untuk menggambarkan tentang kondisi nelayan dan pembudidaya sesuai dengan tabel 1.1 dan 1.2 diatas maka kami ambil gambaran dari segi perumahan atau tempat tinggal mereka. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuninya yang biasa disebut suatu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan bagi pemiliknya. Semakin baik pasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari status kepemilikan tempat tinggal, luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan juga tempat penampungan akhir kotoran akhir kotoran atau tinja.

Pertama dilihat dari segi luas lantai, luas lantai digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas untuk tiap anggota keluarga. Menurut badan kesehatan dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m^2 .

Rumah di Kabupaten Kapuas Hulu tergolong rumah cukup sehat, ini dapat dilihat dari tabel 1.3 yang menunjukkan bahwa persentase luas lantai per anggota rumah tangga (ART) sudah mencapai 55,32% untuk kriteria luas lantai $10\text{m}^2 - 19\text{m}^2$. Angka ini sudah dianggap wajar, melihat situasi dan kondisi masyarakat di Kapuas Hulu. Tetapi kriteria luas lantai dibawah 10m^2

pun, agak tergolong sedang juga sebesar 35,16%. Artinya masih ada masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena tingkat hunian yang rata-ratanya dibawah 10m² cenderung dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan penghuninya seperti infeksi penyakit kulit dan penyakit menular lainnya.

Tabel 1.3
Persentase rumah tangga Nelayan dan Pembudidaya menurut rata-rata luas lantai per anggota rumah tangga di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012

No	Luas Lantai per ART (m ²)	Persentase (%)
1	0 – 9	35,16
2	10 – 19	55,32
3	20 – 29	7,71
4	30 – 39	0,93
5	40 +	0,87
Jumlah		100

Sumber : Susenas 2012, BPS Kab. Kapuas Hulu

Sebagian besar rumah tangga nelayan dan pembudidaya di Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan jenis lantai bukan tanah, menurut tabel 1.4 persentasenya sebesar 98,7%. Penggunaan jenis lantai bukan tanah ini disebabkan karena jenis tanahnya adalah jenis gambut, jenis tanah ini sangat tidak mendukung apabila dibuat rumah beralaskan tanah. Karena lama-kelamaan dapat membuat pondasi rumah berubah dengan sendirinya. Oleh karena itu model rumah masyarakat daerah Kapuas Hulu dibuat jenis model rumah panggung.

Tabel 1.4
Persentase rumah tangga menurut jenis lantai yang dipergunakan
di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012

No	Jenis lantai yang dipergunakan	Persentase (%)
1	Bukan tanah	98,70
2	Tanah	0,25
3	Lainnya	1,05
Jumlah		100

Sumber : Susenas 2012,BPS Kab. Kapuas Hulu

Kedua dilihat dari segi sumber air minum, salah satu fasilitas pokok yang harus terpenuhi disuatu rumah adalah tersedianya air bersih dan sehat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh darimana sumber air itu berasal. Berdasarkan data susensus tahun 2012, sumber air minum yang banyak digunakan adalah air sungai, sebesar 41,59%, untuk leding 20,33% dan 17,64% untuk mata air terlindungi. Pengkonsumsian air sungai dan mata air terlindungi adalah masyarakat yang masih tinggal di desa yang jauh dari kota dan di lingkungannya banyak aliran sungai. Mereka memilih jalan praktis dan ekonomis tanpa memperdulikan aspek kesehatan. Sedangkan mereka yang dikota, lebih memilih menggunakan air leding meteran karena sudah ada fasilitas dari PDAM.

Ketiga dilihat dari segi fasilitas tempat buang air besar (jamban), fasilitas lain yang sendiri. Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri cukup tinggi sebesar 59,30%. Diikuti dengan tidak adanya jamban sendiri sebesar 24,63%, ketidakterersediaan jamban sendiri mengakibatkan banyak rumah tangga yang melakukan pembuangan akhir di sungai. Ini dapat

dilihat pada tabel 1.5 yang menunjukkan angka persentase sebesar 36,77%. Padahal pembuangan akhir disungai jika dikaitkan dengan sumber air minum masyarakat kapuas hulu, dapat berakibat fatal dilihat dari unsur kesehatan.

Tabel 1.5
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012

No	Jenis fasilitas buang air besar	Persentase (%)
1	Sendiri	59,30
2	Bersama	13,48
3	Umum	2,59
4	Tidak ada	24,63
Jumlah		100

Sumber : Susenas 2012,BPS Kab. Kapuas Hulu

Tabel 1.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012

No	Tempat Pembuangan Akhir	Persentase (%)
1	Tangki/SPAL	24,76
2	Sungai/danau	36,77
3	Lubang tanah	35,51
4	Tanah lapang/kebun	2,72
5	Lainnya	0,23
Jumlah		100

Sumber : Susenas 2012,BPS Kab. Kapuas Hulu

Terkait dengan konsumsi ikan di Indonesia, sasaran pembangunan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 tahun ke depan untuk produksi perikanan diproyeksikan meningkat rata-rata 1,9%,

sedangkan nilainya meningkat rata-rata sebesar 7,2% per tahun. Untuk konsumsi makan ikan di Kabupaten Kapuas Hulu diproyeksikan meningkat 2 % per tahun, dimana pada tahun 2012 meningkat sebesar 30 kg/kapita, hingga mencapai 33 kg/kapita pada tahun 2015. (Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, 2013).

Kegiatan usaha industri (kecil) pengolahan hasil perikanan terkonsentrasi di Desa Piasak Kecamatan Selimbau dan lainnya di Kecamatan Jongkong, Bunut Hilir dan Embaloh Hilir. Kegiatan pengolahan ikan di Desa Piasak kebanyakan masih dilakukan secara tradisional berupa industri rumah tangga (*home industri*), seperti pengolahan ikan segar (pendinginan), ikan asin (pengasinan), ikan asap (pengasapan) dan kerupuk ikan. Selain itu, teknik mengolah ikan masih dilakukan secara manual tanpa memperhatikan *sanitasi* dan *hygienes*, sehingga kualitasnya menjadi rendah.

Meski produk yang dihasilkan masih tradisional dengan peralatan yang sederhana, selama ini kegiatan pengolahan ikan di Desa Piasak mampu menunjang kebutuhan akan protein hewani bagi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan produksi kerupuk ikan di Desa Piasak Kecamatan Selimbau, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Perikanan telah melakukan beberapa upaya dalam mendukung usaha masyarakat Desa Piasak dalam melakukan usaha pengolahan kerupuk ikan. Sebagai contoh upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah dengan membangun rantai jemur

kerupuk ikan dan bantuan-bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan. Adapun jenis bantuan peralatan yang diberikan oleh Dinas Perikanan kepada Kelompok pengolah di Desa Piasak sebagai mana yang terdapat pada tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7. Daftar Bantuan Peralatan di Desa Piasak Tahun 2010 s/d 2012

No	Alamat Penerima	Nama Peralatan	Jumlah (unit)	Sumber Dana	Thn
1.	Kelompok Pengolah Desa Piasak	- Dandang Pengukus - Wajan/Kuali - Hand Sealer	- 130 - 130 - 72	Tugas Pembantuan (APBN)	2010
2.	Kelompok Pengolah Desa Piasak	- Dandang Pengukus - Wajan/kuali - Mesin Penggiling Ikan	- 90 - 90 - 13	Tugas Pembantuan (APBN)	2011
3.	Kelompok Pengolah Desa Piasak	- Frezeer - Mesin Penggiling ikan	- 10 - 14	Tugas Pembantuan (APBN)	2012

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2012 menyatakan bakal terus mendorong pengembangan sektor kelautan perikanan melalui proses industrialisasi. Program Industrialisasi merupakan upaya intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha perikanan supaya menjadi pemain industri nasional yang dapat bersaing di pasar internasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menjadi strategis, karena dengan adanya peningkatan nilai tambah dari suatu produk maka meningkat pula nilai jualnya. Strategi pengembangan industrialisasi perikanan dibagi menjadi dua skala, yaitu pertama, korporate besar dengan strategi klasterisasi,

revitalisasi, strukturisasi dan kemitraan. Kedua, skala UMKM dengan strategi penyentraan, polakerjasama kemitraan dan peningkatan kapasitas usaha.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pondasi penting untuk keberhasilan program industrialisasi, mengingat mayoritas dunia usaha di Indonesia sebagian besar didominasi oleh UMKM. Hanya saja sebagian besar UMKM tersebut masih memiliki banyak kendala, diantaranya permodalan, teknologi, informasi pasar dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam upaya pengembangan industrialisasi skala UMKM, peran Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) menjadi sangat "sentral" karena melalui PUMP diharapkan mampu menumbuh kembangkan perekonomian sektor riil, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, menanggulangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, menumbuhkan wirausaha-wirausaha, menggerakkan masyarakat menggunakan teknologi sehingga derivasi produk olahan semakin berkembang dan tanpa limbah (zero waste). Dengan demikian diharapkan PUMP merupakan "karpet merah" dalam mewujudkan pengutamaan kedaulatan rakyat (Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan).

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) merupakan fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam wadah Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) sebagai kelembagaan pelaksana PUMP-P2HP. Melalui prinsip-prinsip pemberdayaan yang partisipatif,

PUMP-P2HP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan kelompok usaha. Sehingga outcome atau dampak yang diharapkan dari kegiatan PUMP P2HP ini adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta menumbuhkan ekonomi lokal bagi penciptaan lapangan kerja baru. Bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pengolah yang ada di Desa Piasak adalah dengan adanya bantuan dana melalui program PUMP-P2HP berupa bantuan alat pengolah sebagaimana yang ada pada tabel 1.8 berikut.

Tabel 1.8. Daftar Peralatan Bantuan dari Program PUMP-P2HP Tahun 2011

No	Alamat	Nama Peralatan	Jumlah (unit/buah)	Sumber Dana	Thn
1.	Desa Piasak	- Frezeer	- 30	APBN	2011
		- Baskom Stainless	- 30		
		- Timbangan Digital	- 30		

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012

Sehubungan dengan bantuan tersebut diatas ternyata belum mampu memberikan dampak yang begitu berarti bagi peningkatan produksi kerupuk ikan di Desa Piasak Kecamatan Selimbau, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut.

Tabel 1. 9. Produksi Kerupuk Ikan di Desa Piasak tahun 2009 s/d 2012

No	Kelompok	Produksi (Kg) Thn 2009	Produksi (Kg) Thn 2010	Produksi (Kg) Thn 2011	Produksi (Kg) Thn 2012
1	2	3	4	5	6
1.	Putri Pangeran	22.800	20.700	20.300	16.500
2.	Putri Bulan	17.600	16.850	20.000	16.000
3.	Arwana	15.600	12.700	14.600	11.650
4.	Pelangi	28.900	22.300	24.800	22.500
5.	Bintang	28.600	22.850	23.700	22.450
6.	Rahmat	34.400	30.450	27.200	24.300
7.	Cendrawasih	18.200	15.350	14.100	11.500
8.	Merpati	19.100	15.650	15.300	12.900
9.	Rajalawi	21.450	18.600	19.400	17.650
10.	Purnama	19.540	16.300	16.200	14.050
11.	Cinta kasih	6.000	5.850	6.650	6.200
12.	Usaha Jaya	30.000	25.100	21.400	15.200
13.	Harapan Jaya	23.500	21.150	18.100	17.000
14.	Teratai	14.650	13.350	12.300	9.800
15.	Melati	23.640	18.650	18.200	15.950
16.	Mawar	15.900	13.800	13.800	13.300
17.	Mentari	18.700	14.400	14.000	12.900
18.	Fajar	9.350	7.600	7.700	7.400
19.	Usaha maju	19.800	15.200	14.000	13.200
20.	Makmur abadi	20.400	19.100	15.200	14.400
21.	Anggrek	23.900	20.250	20.600	19.600
Jumlah		432.030	366.200	357.550	314.450

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu (2013)

Berdasarkan tabel diatas ternyata terjadi penurunan produksi kerupuk ikan disentra Desa Piasak, walaupun telah mendapatkan bantuan dari

pemerintah ternyata bantuan itu belum mampu untuk meningkatkan produksi kerupuk di Desa Piasak. Berdasarkan hasil produksi tersebut penulis memandang bahwa adanya masalah yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian yaitu tentang Dampak Bantuan Peralatan pada Produksi Kerupuk Ikan di Desa Piasak Kecamatan Selimbau.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada kelompok masyarakat pengolah di Desa Piasak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas hasil pemanfaatan bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan di Desa Piasak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Proses Pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada kelompok masyarakat pengolah di Desa Piasak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hasil pemanfaatan bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan di Desa Piasak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Meningkatkan khasanah keilmuan tentang pengelolaan industri hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya khususnya produksi kerupuk ikan.

2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan sebagai solusi dalam rangka peningkatan pendapatan Masyarakat pengolah hasil perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyusun rencana kerja dalam rangka memberikan bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan pada masa-masa yang akan datang.
2. Dinas Perindustrian Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan bantuan peralatan sekaligus pelatihannya, agar para nelayan dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dan yang terpenting mereka dapat meninggalkan kebiasaan tradisional menjadi yang lebih maju, sehingga hasil industri dapat dicapai lebih maksimal.
3. Pihak bank atau para investor agar dapat memberikan bantuan permodalan para Pengolah dalam mengembangkan dan meningkatkan industri kerupuk ikan sehingga mampu meningkatkan hasil produksi.
4. Para peneliti yang sebagai salah satu referensi untuk penelitian lanjutan tentang pengolahan hasil perikanan khususnya pembuatan kerupuk ikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Implementasi

Menurut Usman (2002:70) “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Menurut Setiawan (2004:39) “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Sedangkan menurut Harsono (2002:67) “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Dari Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat juga dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain

dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

2. Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart (dalam Tangkilisan, 2003:12) “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan. Adapun menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003:2) “Kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat” Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan

yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. Menurut Islamy (1997:5) “Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom*.”

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Hogwood and Gunn (dalam Tangkilisan, 2003). Secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
- b. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
- c. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai (hal. 5)

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi.

Adapun menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003) terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
- b. Adanya *output* kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat (hal. 2)

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut

dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. **Comunication** (Komunikasi)
2. **Resources** (Sumber Daya)
3. **Disposition** (Disposisi)
4. **Bureaucratic Structur** (Struktur Birokrasi) (Edward 1980:147)

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan

dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di

samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain:

“Tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, yaitu: pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”.(Van Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007: 105).

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat

menerima, netral atau menolak.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

4. Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (tahun 2006), kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tt obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan); mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan). Dari pengertian diatas maka secara umum efektivitas menunjukkan bagaimana akibat atau hasil dari tindakan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Sawyer (2005 : 211) “Efektivitas (*effectiveness*) menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu”.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Sedangkan Georgopolous dan Tannebaum (1985:50), mengemukakan:

“Efektifitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektifitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya Menurut Gie (1967:90):

“Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektifitas

merupakan pencapaian suatu tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sasaran dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. roses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni:

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

- c. pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220).

Tague-Sutcliffe (1996: 1-3), mengartikan evaluasi sebagai "*A systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils*". Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Dan penilaian bersifat kualitatif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto (2009 : 3) bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan

ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas.

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008), bahwa:

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (hal. 2).

Sedangkan Uzer (2003), mengungkapkan bahwa:

Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan (hal. 120).

Menurut Djaali dan Pudji (2008 : 1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai “Proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”. Sedangkan Ahmad

(2007: 133), mengatakan bahwa “Evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek,dll.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”.

Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria

namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000: 13), mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. “Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses” (Sudharsono, dalam Lababa, 2008: hal. 28).

Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.

Menurut Crawford (2000; 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah untuk :

- a. mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- b. memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
- c. mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- d. memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

B. Usaha Perikanan

Menurut PP No. 15 tahun 1990, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagai salah satu bidang usaha perikanan merupakan semua usaha perorangan atau badan hukum untuk mengolah, menyimpan, mendinginkan mengawetkan, memasarkan ikan dan produk olahannya untuk tujuan komersil. Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan merupakan salah satu komponen penting dalam pemanfaatan sumberdaya ikan secara komersial. Hal ini karena usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menjadi penggerak utama pengelolaan sumberdaya ikan, sehingga sumberdaya ikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan dan kesejahteraan hidup manusia.

Menurut Monintja (2001) dan Hanafiah dan Saefuddin (1983), dalam operasionalnya, usaha perikanan termasuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan membutuhkan dukungan dan berkaitan erat dengan komponen lainnya, seperti sumberdaya manusia, sarana produksi, prasarana pendukung, dan pasar.

1. Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia merupakan penggerak suatu usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Supaya kinerja usaha baik, maka sumberdaya manusia harus berkualitas dan menguasai teknologi yang dibutuhkan dalam operasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2. Sarana produksi

Pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sarana produksi ini dapat mencakup mesin, peralatan produksi, pabrik es, gudang, instalasi air tawar dan listrik, alat transportasi, pusat pendidikan dan diklat tenaga kerja. Sarana produksi penting karena pelaksanaan operasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sangat tergantung pada kesiapan sarana produksi ini.

3. Pasar

Pasar merupakan tempat dimana terjadi arus pergerakan barang-barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen. Pasar produk akan menentukan keberlanjutan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di masa datang.

Perlu disadari, bahwa operasional usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan perlu diarahkan sehingga juga mendukung kelestarian sumber daya ikan, mengatur pemanfaatan dan distribusi produk perikanan, dan mengantisipasi perilaku pelaku bisnis perikanan sehingga sejalan dengan kebijakan yang diterapkan. Menurut Fachruddin (2004),

operasional usaha perikanan termasuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan merupakan upaya yang dinamis, yaitu sesuai permintaan dengan konsumen yang senantiasa terus berkembang. Dalam kaitan ini, maka kontribusi setiap komponen pendukung menjadi semakin penting guna mengantisipasi perubahan-perubahan dalam hal ekonomi, teknologi, dan lingkungan, termasuk penggunaan cara-cara tradisional dalam pengolahan hasil perikanan.

Sebagai implikasi dari perkembangan kebutuhan konsumen, maka menurut Fauzi (2004) penyesuaian atau perubahan dapat terjadi pada tujuan, strategi dan operasional usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Semakin efisien teknologi produksi pada usaha pengolahan berarti semakin produk olahan perikanan yang dapat dimanfaatkan dan semakin sedikit *reject* yang dibuang ke alam yang justru dapat merusak lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi pelayanan kepada konsumen yang dari waktu ke waktu jenis kebutuhan terus meningkat dan berubah termasuk terhadap jenis-jenis produk olahan hasil perikanan.

C. Pengolahan Hasil Perikanan

Proses pengolahan dan pengawetan ikan merupakan salah satu bagian penting dari mata rantai industri perikanan. Tanpa adanya kedua proses tersebut, peningkatan produksi ikan yang telah dicapai selama ini akan sia-sia, karena tidak semua produk perikanan dapat dimanfaatkan oleh konsumen dalam keadaan baik. Pengolahan dan pengawetan bertujuan

mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama mungkin dengan cara menghambat atau menghentikan sama sekali penyebab kemunduran mutu (pembusukan) maupun penyebab kerusakan ikan, agar ikan tetap baik sampai ketangan konsumen (Afrianto dan Liviawaty, 1989).

Menurut Afrianto dan Liviawaty (1989), tujuan utama proses pengawetan dan pengolahan ikan adalah:

1. Mencegah proses pembusukan ikan terutama pada saat produksi melimpah;
2. Meningkatkan jangkauan pemasaran ikan;
3. Melaksanakan diversifikasi pengolahan produk-produk perikanan;
4. Meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan, sehingga mereka terangsang untuk melipatgandakan produksi (hal. 61).

D. Prinsip Dasar Pengolahan Ikan

Pengawetan merupakan usaha penanggulangan kemunduran mutu ikan yang lebih cepat, sehingga ikan lebih tahan lama dan dapat memperluas daerah pemasaran. Usaha pengawetan timbul karena adanya faktor kurangnya konsumen yang dapat disebabkan oleh kurang sempurnanya sarana pengangkutan atau adanya produksi yang berlebihan (Irawan, 1995: halaman 9).

Pengolahan ikan merupakan suatu cara untuk mempertahankan agar keadaan ikan tetap dalam kondisi baik. Artinya proses pembusukan yang umumnya berjalan dengan cepat, dapat dihambat selama mungkin sampai tiba waktunya ikan-ikan itu dimasak sebagai bahan konsumsi. Seperti kita ketahui bahwa ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (membusuk). Hanya dalam waktu 8 jam sejak ikan ditangkap dan didaratkan sudah akan timbul

proses perubahan yang mengarah pada kerusakan. Karena itu agar ikan dan hasil perikanan lainnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, perlu dijaga kondisinya. Lucke dan schwartz (1937 *dalam*, Rahardjo, 2000: halaman 10), melakukan penelitian yang dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda selama penangkapan dan penjualan ikan, sebagai upaya untuk menemukan penyebab pembusukan ikan dan dampaknya terhadap kerugian ekonomi.

Kandungan bakteri selama musim menangkap ikan sebesar 50 bakteri/ml belum merupakan penyebab infeksi, sebab diperairan dekat pantai yang tercemar memiliki kandungan bakteri sampai jutaan/ml. Keberadaan histamin pada otot ikan yang telah mati sebagai akibat kegiatan bakteri, menurut Geiger *et al* (1944, *dalam* Rahardjo, 2000: halaman 10) dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kualitas atau tingkat pembusukan ikan. Beberapa bakteri penghasil histamin adalah *Aeromonas*, sp., *Citrobacter* sp., *Hafnia alvei*, *Proteus morganii*, *P. vulgaris*, dan *vibrio* sp. (Okuzumi *et al*, *dalam* Rahardjo, 2000: halaman 10).

Proses pengolahan yang dilakukan bertujuan untuk menghambat atau menghentikan aktivitas zat-zat dan mikroorganisme perusak atau enzim-enzim yang menyebabkan kemunduran mutu dan kerusakan. Dari berbagai cara pengolahan yang umumnya dilakukan, pada dasarnya dibagi menjadi empat golongan, yaitu pengolahan dengan memanfaatkan faktor fisikawi, pengolahan dengan bahan pengawet, pengolahan yang memanfaatkan faktor fisikawi dan bahan pengawet serta pengolahan dengan cara fermentasi.

Pengolahan dengan faktor fisikawi tidak lain merupakan pengolahan yang memanfaatkan suhu tinggi atau suhu rendah. Suhu tinggi dalam hal ini digunakan untuk membunuh mikrobia kontaminasi yang terdapat pada ikan sekaligus menghentikan aktivitas enzim dalam daging ikan (Irawan, 1995: halaman 11).

E. Kerupuk

1. Pengertian

Menurut Standar Industri Indonesia (SII) No. 0272-90 kerupuk didefinisikan sebagai produk makanan kering yang dibuat dari tepung tapioka dengan atau tanpa penambahan bahan makanan atau bahan tambahan makanan lainnya yang diijinkan, harus disiapkan dengan cara menggoreng atau memanggang sebelum. Menurut Sudibyo (1979), kerupuk merupakan sejenis makanan kecil yang mengalami pengembangan volume membentuk produk yang berongga dan mempunyai densitas rendah selama penggorengan, terbuat dari bahan yang mengandung pati cukup tinggi. Di dalam proses pembuatan kerupuk, pati tersebut harus mengalami proses gelatinisasi akibat adanya penambahan air serta perlakuan pemanasan terhadap adonan yang terbentuk (setiawan, 1988).

Kerupuk dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu kerupuk tidak berprotein dan kerupuk yang memiliki kandungan protein. Kerupuk tidak berprotein adalah kerupuk yang dalam pembuatannya tidak menggunakan bahan yang merupakan sumber protein, baik itu protein

hewani atau protein nabati, sedangkan kerupuk yang memiliki kandungan protein adalah kerupuk yang dalam pembuatannya menggunakan bahan sumber protein hewani maupun nabati seperti udang dan ikan. Menurut Wijandi *et al.*, 1975, jenis kerupuk dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu kerupuk kasar yang dibuat dari bahan baku utama pati ditambahkan bumbu-bumbu dan kerupuk halus yang dibuat selain dari bahan baku utama pati dan bumbu, juga ditambahkan dengan ikan, susu dan telur ke dalam adonan. Pemanfaatan ikan yang digunakan sebagai bahan baku dapat berasal dari hasil sampingan proses pengolahan lain atau bahan segar, tergantung kualitas kerupuk yang diharapkan (Afrianto dan Liviawaty, 1989).

Kerupuk ikan merupakan produk makanan kering hasil olahan ikan yang dicampur dengan tepung tapioka. Kerupuk ikan ini bentuknya bermacam-macam, ada yang bulat, setengah lingkaran atau berbentuk rantai. Rasanya enak dan gurih, serta daya simpanya relatif lama. Kandungan nilai gizi kerupuk tergantung pada bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan. Pada umumnya produk-produk sejenis kerupuk banyak mengandung karbohidrat, karena bahan baku utamanya mempunyai kadar karbohidrat yang relatif tinggi. Kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk kedelai dan kerupuk telur banyak mengandung protein, hal ini disebabkan karena pada proses pembuatannya menggunakan bahan tambahan yang berkadar protein cukup tinggi.

Mutu kerupuk ikan ditentukan oleh proporsi ikan didalam kerupuk. Semakin banyak jumlah ikan yang ditambahkan semakin tinggi mutu kerupuk ikan. Tetapi penambahan bahan bantu terlalu banyak akan mempengaruhi tekstur dan penampakan kerupuk yang dihasilkan serta kerenyahannya. Dimana kerenyahannya ikan sangat ditentukan oleh kadar air, sedangkan daya kembang kerupuk saat digoreng ditentukan oleh jumlah tepung tapioka yang ditambahkan. Sebagai contoh untuk kerupuk ikan mutu I. Perbandingan tepung tapioka: ikan = 1 : 1, mutu II. Perbandingan tepung tapioka : ikan = 4 : 3, mutu III perbandingan tepung tapioka : ikan = 2 : 1. Penambahan telur dalam adonan juga meningkatkan mutu kerupuk ikan. Kerupuk yang disukai oleh konsumen adalah kerupuk yang mempunyai rasa lezat, gurih dan renyah. Ada tiga tahap penting dalam pembuatan kerupuk, yaitu pembuatan adonan, pencetakan adonan, dan pengeringan. Sedangkan menurut Siahaan (1988), mengemukakan bahwa proses yang terpenting dalam pembuatan kerupuk adalah proses pengukusan dan penggorengan.

Kerupuk mentah yang dihasilkan bersifat kering dan mudah dipatahkan (getas). Kerupuk mentah berbentuk bulat agak lonjong, dengan ketebalan (2-3 mm) dan berat sekitar 2 gram per keping. Kerupuk mentah relatif tidak berbau meskipun pada saat pembuatan adonan bau ikan sangat terasa. Hal ini disebabkan hilangnya komponen-komponen penyebab bau/aroma selama proses pengukusan.

2. Bahan Baku Kerupuk Ikan

Kerupuk ikan dibuat dengan bahan dasar tepung tapioka dan atau tepung sagu digunakan untuk pembuatan kerupuk ikan. Dari bahan dasar tersebut ditambahkan sejumlah ikan segar dan bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, garam, gula, air dan bleng (Winarno, 1983). Perbandingan antara daging ikan: tepung tapioka: garam: gula: telur ayam adalah 6 Kg: 6 Kg: 0,2 Kg: 0,25 Kg: 3 butir. Besar perbandingan bahan-bahan itu dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dan tujuan, misalnya tingkat mutu kerupuk. Jika komposisi daging ikan ditambah maka kerupuk dianggap lebih bermutu tinggi (Moeljanto, 1982).

a. Ikan

Bahan baku ikan yang digunakan dalam kerupuk udang/ikan adalah daging dari ikan atau udang, atau bisa juga dengan menggunakan udang kering. Bahan baku ikan umumnya selalu ada baik pada produk yang berlabel kerupuk ikan maupun kerupuk udang. Tidak seperti kerupuk ikan, kerupuk udang biasanya mengandung campuran daging udang dengan proporsi daging ikan yang lebih banyak. Hal ini dipertimbangkan karena adonan akan pecah-pecah jika menggunakan daging udang sepenuhnya.

b. Tepung tapioka

Tepung tapioka diolah dari ubi kayu yang kaya akan vitamin C dan karbohidrat, tapi miskin akan lemak dan protein. Tepung tapioka tidak termasuk dalam amilopektin, namun tepung tapioka memiliki

sifat-sifat yang mirip dengan amilopektin. Diantara sifat-sifat amilopektin yang sangat disukai oleh para ahli pengolahan pangan adalah: sangat jernih, tidak mudah menggumpal, memiliki daya perekat yang tinggi, tidak mudah pecah atau rusak, dan suhu gelatinasi lebih rendah. Walaupun demikian amilopektin lebih memiliki sifat yang kurang menyenangkan, diantaranya adalah sifat yang kohesif, viskositas tinggi, serta mudah rusak jika mendapat perlakuan panas dan asam (Tjokroadikoesoemo, 1986).

c. Telur

Telur yang ditambahkan pada pembuatan kerupuk ikan dimaksudkan untuk meningkatkan gizi, rasa dan bersifat sebagai pengemulsi serta pengikat komponen-komponen adonan. Telur juga berperan sebagai pengikat udara dan menahannya sebagai gelembung. Penggunaan telur pada pembuatan kerupuk udang/ikan akan mempengaruhi kemekaran kerupuk ikan/udang pada waktu digoreng (Saraswati, 1986).

d. Gula, Garam, dan Bumbu

Pada dasarnya pemberian gula dalam pembuatan kerupuk ikan penting untuk memberikan efek rasa. Pemberian garam juga sangat penting karena selain memberikan efek rasa juga mempengaruhi tingkat kekuatan adonan. Gula dalam adonan kerupuk ikan/udang berperan dalam memberikan rasa manis, memperbaiki mutu kerupuk, menambah nilai gizi, dan sebagai pengikat. Sedangkan garam selain sebagai

penambah rasa juga sebagai bahan pengawet (Saraswati, 1986). Untuk menambah cita rasa ikan, kadang-kadang ditambah bumbu-bumbu berupa rempah-rempah seperti: bawang merah, bawang putih, ketumbar. Monosodium glutamat (MSG) atau penyedap rasa dapat juga digunakan sebagai pengganti rempah-rempah tetapi jumlah yang digunakan harus sesuai dengan peraturan pemakaian yang berlaku (Direktorat Gizi Departemen Kesehatan, 1979 *dalam* Apriyadi 2003).

e. Air

Fungsi utama air adalah sebagai pembantu dalam pembentukan gluten pada tepung tapioka, juga melarutkan gula, garam, serta bahan-bahan lain agar bisa bercampur (Saraswati, 1986).

3. Proses Pembuatan Kerupuk Ikan

Pembuatan kerupuk ikan menurut Afrianto dan Liviawaty (1989):

Secara tradisional dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu penyiapan bahan, pembuatan adonan, pengukusan/perebusan, pemotongan, pengeringan dan pengepakan .

- a. Penyiapan bahan dilakukan dengan menentukan dua bahan baku utama, yaitu ikan dan tepung. Pemilihan ikan dilakukan dengan memilih jenis ikan yang cocok serta memiliki kualitas baik. Jenis ikan yang digunakan antara lain ikan Belidak, ikan Toman, ikan Gabus atau ikan lainnya. Sedangkan tepung yang digunakan adalah tepung tapioka dan tepung terigu.
- b. Langkah selanjutnya setelah bahan-bahan disiapkan maka dilakukan pembuatan adonan. Ikan yang telah disiapkan direbus dan selanjutnya ikan yang telah direbus tersebut dipisahkan dari tulangnya. Kemudian dicampur dengan tepung untuk dibuat menjadi adonan yang siap untuk dicetak menjadi bulatan atau lonjong.
- c. Proses selanjutnya adonan tersebut direbus/dikukus selama kurang lebih 2 jam, kemudian ditiriskan dan didinginkan.
- d. Pemotongan dilakukan secara cermat agar memperoleh hasil dengan lebar/tebal pemotongan yang sama.

- e. Kemudian dilakukan pengeringan dengan menjemur di bawah sinar matahari pada tempat yang telah disiapkan. Pengeringan harus dilakukan sampai kering benar, biasanya sekitar tiga hari berturut-turut. Sebab jika tidak sampai kering benar akan berjamur.
- f. Proses terakhir adalah pengepakan yang dilakukan dengan peralatan sederhana dan kemudian siap dipasarkan.

Dalam pembuatan kerupuk ikan ini tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memerlukan *skill* yang tinggi. Hal ini terjadi karena alat produksi yang sederhana tidak membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi.

4. Pengemasan

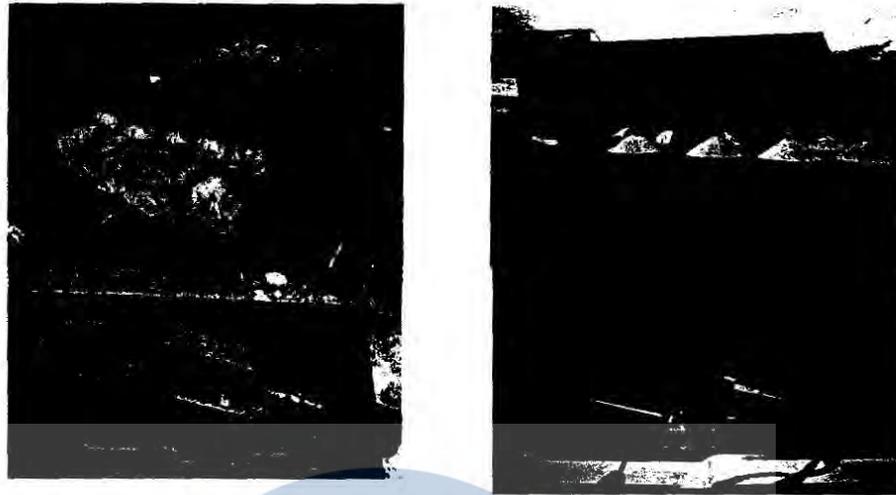
Pengemasan merupakan bagian akhir dari proses produksi bahan pangan atau produk lain. Syarat-syarat yang digunakan untuk kemasan pangan antara lain transparan, tidak mengandung bahan berbahaya (toksik), kontrol yang baik terhadap pemindahan uap air dan gas-gas, cocok pada kisaran suhu yang luas baik dalam penyimpanan maupun penggunaan, dan murah (Syarif dan Soenarjo, 1985: halaman 45). Salah satu fungsi kemasan adalah untuk menampakkan identifikasi, informasi dan penampilan yang jelas agar dapat membantu promosi atau penjualan. Keterangan yang memuat hal tersebut dinamakan etiket atau label.

Etiket yang tercantum harus cukup besar agar dapat menampung semua keterangan yang diperlukan mengenai produk dan tidak boleh mudah lepas, luntur atau lekang air. Pernyataan yang terdapat dalam etiket harus ditulis dengan jelas, ukuran angka dan huruf cukup besar dan warna yang cukup kontras dengan latar belakangnya. Label ini harus memuat

nama makanan dan merek dagang, komposisi, isi netto, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan, nomor pendaftaran, dan kode produksi (Syarif dan Soenarjo, 1985: halaman 45).

5. Peralatan

Untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan intensitas *home industry* menjadi industri pedesaan diperlukan berbagai peralatan untuk mendukung setiap tahapan pembuatan kerupuk ikan. Proses produksi kerupuk ikan pada dasarnya meliputi sekurang-kurangnya ada enam kegiatan, yaitu mulai dari persiapan bahan baku, pembuatan adonan dan pencetakan, pengukusan, pemotongan, penjemuran dan pengemasan (Afrianto dan Liviawaty, 1989 dan Suryani, *et al.* 2005). Peralatan yang dibutuhkan berupa alat pembuatan adonan, alat untuk mengukus atau merebus adonan (panci besar) dan alat pemasak (kompor). Peralatan lain yang diperlukan juga yaitu alat pemotong adonan kerupuk, peralatan penjemuran serta alat pengepakan. Peralatan *home industry* yang paling sederhana pada proses pembuatan kerupuk ikan terlihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Alat sederhana pencetak, pengukus, pemotong dan pengemas kerupuk ikan.

Hubungan antara peralatan dan proses industri bahwa peralatan akan mendorong percepatan proses dan peningkatan hasil industri. Peralatan tradisional dengan tenaga manusia akan menghasilkan output yang sedikit jumlahnya dibandingkan dengan peralatan mesin.

F. Tenaga Kerja

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kelangsungan hidup, masyarakat nelayan menuntut individu-individu yang ada dalam rumah tangga mereka untuk berusaha maksimal dan bekerjasama. Oleh karena itu masyarakat nelayan tradisional melakukan upaya diversifikasi usaha di luar penangkapan ikan tetapi masih terkait dengan kegiatan perikanan dan melibatkan seluruh anggota keluarga. Diversifikasi usaha yang merupakan usaha sampingan itu diantaranya kegiatan *home industry* pengolahan hasil perikanan, pemasaran ikan eceran dan hasil *home industry*. Namun, usaha tersebut bersifat sangat tradisional dan hanya sebagai usaha

sampingan dengan tenaga kerja dari seluruh anggota keluarga yang tidak memiliki kemampuan ketrampilan teknis, peralatan dan manajemen yang baik (Kusnadi, 2002: halaman 17).

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian Kusnadi di atas, tampak bahwa *home industry* perikanan khususnya *home industry* kerupuk ikan yang merupakan salah satu bentuk diversifikasi usaha menggunakan tenaga kerja utama yaitu anggota keluarga sendiri. Disamping itu tenaga kerjanya tidak memiliki kemampuan teknis dan manajemen yang baik.

Padahal menurut Heidjrahman dan Husnan (2002):

“Salah satu syarat agar suatu usaha memberikan hasil produksi yang baik adalah tenaga kerja yang memiliki mutu yang baik.”

Sedangkan jika merujuk ke pendapat Stooner (1971) di atas yaitu:

“Kinerja seseorang adalah merupakan fungsi dari motivasi, kemampuan/kecakapan, dan persepsinya atas peran yang harus dilakukan maka tenaga kerja pada *home industry* perikanan nampaknya tidak memenuhi salah satu variabel yaitu kemampuan/kecakapan”.

G. Perilaku Sosial Masyarakat

Dilihat dari perspektif antropologis, masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan, atau masyarakat di dataran tinggi. Hal ini didasarkan pada realitas sosial bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda sebagai hasil interaksi dengan lingkungan beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Pola kebudayaan masyarakat nelayan yang tercermin pada perilaku sosialnya sangat dipengaruhi oleh pranata penangkapan ikan dan pemasarannya.

Pranata ini sangat membelenggu masyarakat nelayan lapisan bawah yang terdiri dari para buruh nelayan tanpa kepemilikan kapal, sehingga mereka seakan pasrah dalam ketidakmampuan sosial ekonomi dan menjalani saja kehidupannya (Kusnadi, 2003).

Perilaku nelayan yang seakan pasrah dalam ketidakmampuan sosial ekonomi di atas, membuat mereka terjebak dalam kehidupan rutinitas mereka sebagai nelayan dengan sedikit tambahan penghasilan dari pekerjaan sampingan yang terkait dengan kegiatan *home industry* perikanan tanpa ada upaya perbaikan dan peningkatan usahanya. Padahal menurut Pelham dan Wilson (1996:11) dan Pelham (2000, dalam Wignyosoebroto, 2003: halaman 17) diperlukan strategi ke arah keunggulan biaya dan differensiasi kualitas untuk dapat menghasilkan nilai tambah dari produksi.

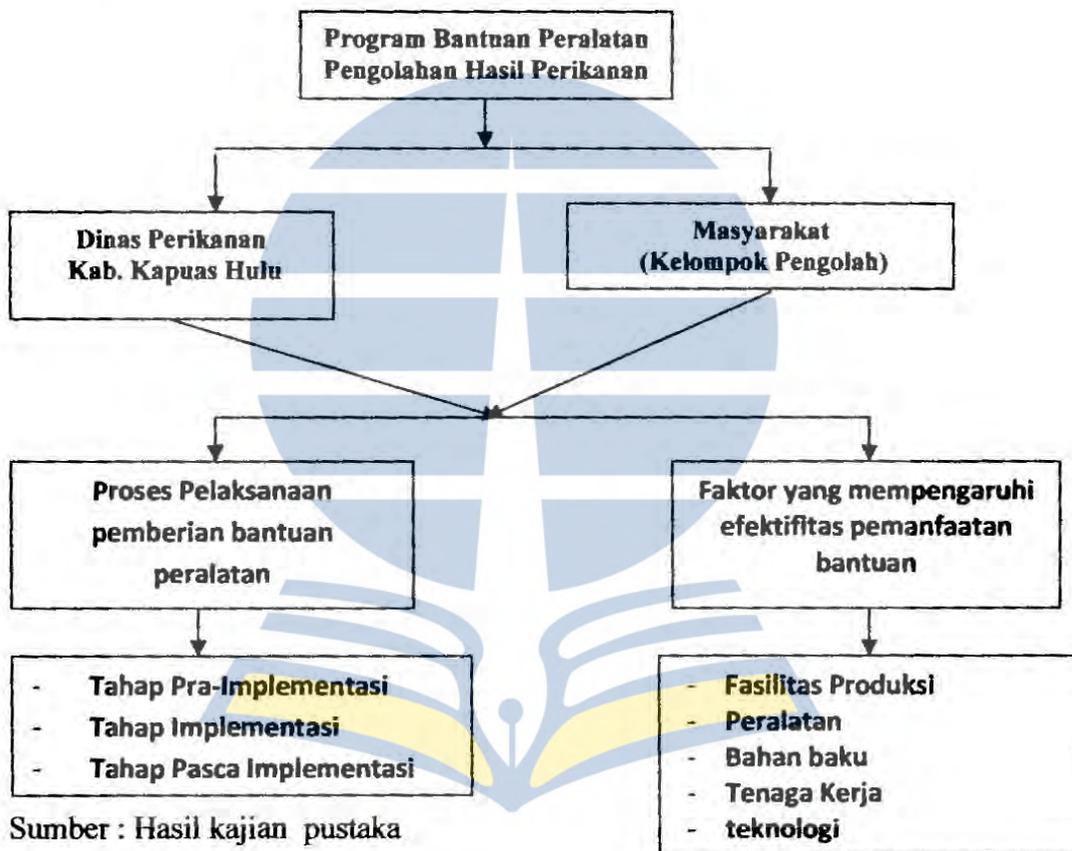
H. Kerangka Pemikiran

Model ekonomi rumah tangga usaha kecil kerupuk ikan disusun berdasarkan pengembangan konsep ekonomi rumah tangga pertanian dari Singh *et al*, (1986). Rumah tangga dalam penelitian ini adalah rumah tangga dalam industri kecil yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan konsep rumah tangga pertanian. Beberapa variabel yang mencirikan karakteristik rumah tangga terkait dengan perilaku untuk memaksimalkan kepuasan seperti jumlah angkatan kerja rumahtangga.

Aktivitas produksi kerupuk ikan tergantung dari kepemilikan input produksi dari rumahtangga. Input produksi meliputi input variabel (tenaga kerja dan bahan baku) dan input tetap (aset). Selain kendala produksi, dalam

memaksimalkan kepuasan rumah tangga juga menghadapi kendala waktu yang tersedia dan pendapatan rumah tangga.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian agar ada perpaduan antara teori, daftar pustaka dan hasil pengamatan dilapangan, maka peneliti membuat kerangka penelitian seperti gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang tidak mencari sebab akibat, namun lebih berupaya memahami situasi tertentu dengan penelitian studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Gejala atau situasi tertentu dimaksud adalah dampak dari bantuan peralatan pengolahan pada sentra pengolahan di Desa Piasak Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam penelitian tersebut data yang diperoleh berasal dari naskah wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya dengan tujuan mendeskripsikan realitas empiris dibalik fenomena yang ada secara mendalam, rinci dan tuntas. Menurut Moleong (2007) berdasarkan kombinasi antara pendapat Bogdan & Biklen dengan Lincoln & Guba, karakteristik atau ciri penelitian kualitatif dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) latar alamiah (*naturalistik*); (2) manusia sebagai instrumen/alat; (3) metode kualitatif (wawancara, pengamatan dan dokumen); (4) analisis data secara induktif (umum ke khusus) (5) teori dari dasar (*grounded theory*) dari bawah ke atas; (6) deskriptif (yaitu data berupa kata-kata, gambar dan ilustrasi); (7) lebih mementingkan proses daripada hasil; (8) adanya batasan yang ditentukan oleh fokus; (9) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data

(mendefinisikan validitas, reliabilitas dan objektivitas) (10) desain yang bersifat sementara; (11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Kegiatannya adalah mendeskripsikan secara intensif dan terperinci tentang gejala dan fenomena yang diteliti yaitu mengenai masalah yang berkaitan dengan dampak bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan terhadap produksi kerupuk ikan pada sentra pengolahan di Desa Piasak Kecamatan Selimbau, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati (interview, observasi dan dokumentasi) serta hal-hal lain yang berkaitan dan diperlukan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan perspektif fenomenologis, yaitu pengalaman subjektif (fenomenologikal) dan merupakan suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang, yang mana dalam hal ini peneliti memahami dan menghayati perilaku para pengolah kerupuk ikan pada sentra pengolahan di Desa Piasak.

Kemudian rancangan penelitian yang akan dipakai adalah studi multi kasus, yaitu suatu penelitian yang mengkaji secara rinci atas beberapa studi kasus tunggal atau beberapa tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu. Dalam hal ini peneliti mengkaji secara rinci tentang dampak bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan terhadap produksi kerupuk ikan pada sentra pengolahan di Desa Piasak. Jadi studi ini berusaha menelaah sebanyak

mungkin data mengenai subjek yang diteliti, dan ini merupakan salah satu daripada metode penelitian ilmu-ilmu sosial.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Piasak Kecamatan Selimbau, yang terletak ± 130 km di sebelah barat Kota Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di sebelah Barat Kota Kecamatan Jongkong. Sedangkan subjek penelitian ini adalah Masyarakat pengolah kerupuk ikan yang ada pada sentra pengolahan desa Piasak. Perjalanan kelokasi dapat ditempuh menggunakan jalur sungai menggunakan *speed boat* 40 pk memerlukan waktu ± 5 jam dan dapat pula menggunakan jalur darat memerlukan waktu $\pm 2,5$ jam. Kalau menggunakan transportasi darat dari Putussibau ke Desa Piasak harus singgah di Jongkong dulu setelah itu baru naik transportasi air lagi, dari jongkong ke piasak dapat ditempuh dengan waktu ± 20 menit. Pemilihan lokasi Desa Piasak sebagai lokasi penelitian dikarenakan Desa tersebut merupakan sentra pengolahan kerupuk ikan pertama di Kabupaten Kapuas Hulu dan lokasi tersebut merupakan daerah yang paling banyak menerima bantuan peralatan pengolahan dari Pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga menurut peneliti alasan tersebut bisa menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian (analisis atau kesimpulan). Data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan (istilah penelitian

kualitatif) informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini informan dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah Pengolah kerupuk ikan pada sentra pengolahan di Desa Piasak.

Teknik pemilihan informan tersebut disebut teknik *purposive sampling*, di mana peneliti cenderung memilih informan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat serta mengetahui masalah secara mendalam. Teknik sampel purposif tersebut relevan dengan persyaratan pada penelitian kualitatif yang di dalamnya tidak terdapat sampel acak, namun sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampel bertujuan adalah sampel yang diambil berdasarkan ada tujuan, dan biasanya diambil berdasarkan beberapa pertimbangan (disebabkan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak bisa mengambil sampel yang lebih luas.

Kemudian untuk memperoleh informasi yang akurat, maka dalam mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi menggunakan teknik sampel bola salju (*snowball sampling technique*). Tehnik *snowball sampling* ini diibaratkan sebagai bola salju yang terus menggelinding, semakin lama semakin besar. Besar dalam artian informasi bertambah besar, dan baru akan berhenti setelah memiliki keterpaduan, dan tidak berkembang lagi. Sedangkan informasi kunci (utama) yang digunakan dalam *snowball sampling technique* adalah:

1. Masyarakat pengolah kerupuk ikan yang menerima bantuan;
2. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pelaksanaan supervisi ini dilakukan secara sirkuler dengan menggunakan tiga (3) pendekatan, yaitu: 1) Observasi ; (2) wawancara ; dan (3) dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu rekaman, pedoman wawancara, dan lainnya yang berhubungan dengan pengumpulan data yang diperlukan sebagaimana memperhatikan saran yang disampaikan oleh Wahidmurni bahwa dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka instrumen kunci adalah peneliti sendiri. Namun demikian dalam pengumpulan data peneliti tetap menggunakan pedoman lain seperti pedoman wawancara, pedoman dokumentasi. Lebih jelasnya teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Menurut Guba dan Lincoln (1981: 191-193) observasi berperan penting dilakukannya dengan beberapa alasan (a) teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung ; (b) teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi

pada keadaan sebenarnya ; (c) pengamatan dapat digunakan untuk mengecek keabsahan data ; (d) teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit ; (e) pada kasus-kasus tertentu di mana penggunaan teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat berguna ; dan (f) sering terjadi keraguan pada penelitian, yang menyebabkan kekeliruan data atau terjadinya bias. Untuk mengecek keabsahan data tersebut dapat dilakukan dengan jalan memanfaatkan pengamatan.

2. Teknik Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Teknik wawancara secara mendalam memerlukan pedoman. Jenis wawancara digolongkan menjadi dua yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diujikan. Ciri-ciri wawancara ini adalah pertanyaan-pertanyaan, waktu, alat wawancara dan hal-hal yang terkait dengan itu disusun rapi dan ketat. Sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah jenis wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan, dengan demikian kreativitas sangat diperlukan.

Karakteristik dari jenis wawancara tidak terstruktur ini adalah hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan, waktu tidak terstruktur, disesuaikan dengan situasi, respondennya hanya bagi orang-

orang terpilih saja, wawancaranya berjalan lama dan diteruskan pada waktu-waktu yang lainnya. Karakteristik wawancara tidak terstruktur ini disarankan oleh Lexy J. Moleong bahwa jenis wawancara ini dilakukan pada (1) orang penting, (2) ingin menanyakan lebih mendalam kepada subjek tertentu, (3) bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan penemuan, (3) tertarik untuk mempersoalkan bagian-bagian tertentu yang tidak normal, (4) tertarik untuk berhubungan langsung dengan responden, (5) dan tertarik mengungkapkan motivasi, peristiwa, situasi atau keadaan tertentu.

Merujuk pada penjelasan tentang karakteristik dari kedua jenis wawancara tersebut di atas, maka jenis wawancara yang dianggap paling tepat oleh peneliti sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini adalah jenis wawancara yang tidak terstruktur. Dipilihnya jenis wawancara tidak terstruktur oleh peneliti pada penelitian ini karena peneliti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Berkenaan dengan judul penelitian “Dampak bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan terhadap produksi kerupuk ikan pada sentra pengolahan di Desa Piasak” maka yang menjadi fokus wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah mereka yang memiliki otoritas di dalam hal tersebut di atas. Di antara mereka yang memiliki otoritas menurut peneliti adalah terdiri dari Masyarakat pengolah kerupuk ikan, pengurus kelompok, kepala Desa dan mereka inilah dijadikan oleh peneliti sebagai informan dan telah diwawancarai pada waktu yang berbeda sesuai

dengan kesiapan informan. Peneliti mewawancarai informan di atas dilakukan dengan cara:

- a. Diberitahukan terlebih dahulu kepada informan mengenai permasalahan yang akan ditanyakan secara garis besar.
- b. Membuat jadwal wawancara meliputi ; waktu wawancara, tempat wawancara dan hari wawancara disesuaikan dengan situasi.
- c. Setelah ada persetujuan antara peneliti dan informan maka peneliti mendatangi informan sesuai jadwal yang ditentukan sebelumnya.
- d. Setelah peneliti bertatap muka secara langsung dengan informan maka peneliti memulai wawancara dengan menanyakan segala persoalan yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian. Setiap kata yang dijawab oleh informan maka peneliti mencatatnya atau merekoednya ke dalam nota kecil yang telah dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya sebagai sumber data. Hal itu akan memudahkan peneliti untuk menyalin ulang sebagai data di dalam tesis. Cara lain yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil wawancara yaitu dengan menggunakan *Plash Disc Record* yakni ketika pertanyaan yang diajukan oleh peneliti maka setiap kata-kata yang disampaikan oleh informan dan direkam ke dalam *Plash Disc Record* sebelum dipindahkan ke dalam tesis sebagai hasil wawancara.
- e. Setelah dilaksanakan wawancara baik melalui *Plash Disc Record* ataupun melalui catatan maka peneliti mengucapkan terima kasih

dan meminta kesediannya kembali untuk melakukan wawancara selanjutnya bila peneliti memerlukan informasi tambahan guna melengkapi data yang ada.

3. Dokumentasi (*documentation*)

Selain kedua teknik tersebut di atas penelitian juga menggunakan teknik dokumentasi guna mempelajari dokumen-dokumen yang sesuai dengan konteks penelitian ini. Dokumen-dokumen yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah seperti: SK penerima bantuan peralatan, Berita Acara Serah terima Barang dan foto-foto pada saat penyerahan barang kepada kelompok penerima bantuan. Semua dokumen yang disebutkan di atas peneliti memperolehnya dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan secara berulang-ulang (*cyclical*) sesuai dengan kebutuhan dan berkembangnya informasi yang muncul pada saat-saat tertentu.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu, yang menurut Moleong (2007) terdapat empat (4) kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Teknik pemeriksaan data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*).

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara, *pertama* memperpanjang waktu observasi di lapangan. Dalam hal ini

peneliti berulang kali melakukan pengamatan kembali dalam rangka untuk mengecek kevalidan data yang tersedia berkaitan dengan pengamatan tentang dampak bantuan peralatan terhadap hasil produksi kerupuk ikan. *Kedua* melakukan pengamatan secara terus menerus. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara terus menerus di tempat penelitian (di Desa Piasak) sehingga memahami gejala lebih mendalam, terfokus dan relevan dengan topik penelitian ini, *ketiga*, melakukan triangulasi, maksud triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Ada tiga triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi metode serta triangulasi teori. Untuk itu peneliti dalam hal ini hanya menggunakan dua triangulasi yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber digunakan peneliti dengan cara membandingkan informasi yang disampaikan oleh informan kunci (pengolah) dengan informan lain seperti ketua kelompok, kepala Desa Piasak dan staf Dinas Perikanan guna validnya data yang diperoleh. Sedangkan Triangulasi metode dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data yang tersebar, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Keteralihan (*transferability*)

Fungsi keteralihan penelitian ini dilakukan dengan cara uraian secara rinci. H. Mudjia Rahardjo menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan keteralihan ini dilakukan dengan cara uraian rinci (*thick*

description). Cara ini digunakan peneliti untuk melaporkan hasil penelitian dengan cermat dan lengkap mungkin yang menggambarkan konteks dan pokok masalah secara jelas yang mengacu pada fokus penelitian. Sebagai contoh hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang diperoleh dari informan akan dipaparkan ke dalam tesis sesuai dengan apa yang disampaikan.

3. Kebergantungan (*dependability*).

Tahapan ini dilakukan kriteria penilaian apakah proses penelitian berkualitas atau tidak dengan cara *auditor independent*. Dalam hal ini yang menjadi *auditor independent* adalah Dr. Netty Herawati, M.Si dan Dr. Maman Rumanta, M.Si selaku pembimbing yang terlibat secara langsung dalam penelitian ini.

4. Kepastian (*confirmability*).

Tahapan ini bertujuan menilai hasil penelitian dengan jalan mengecek data, informasi serta interpretasi hasil penelitian apakah ada kesesuaian antara temuan dengan data perolehan dan metode penelitian. Untuk itu disediakan catatan lapangan, data yang sesuai dengan fokus masalah. Yang menilai hasil kualitas penelitian ini dilakukan oleh Dr. Netty Herawati, M.Si dan Dr. Maman Rumanta, M.Si.

F. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangat penting karena selain validnya suatu penelitian ilmiah juga karena alasan-alasan sebagai

berikut:

1. Fokus penelitian yang dikaji bisa langsung diperoleh informasi dari sumber primer. Artinya memudahkan peneliti untuk mengkolaborasi keadaan, informasi atau data dengan kajian teori yang ada, karena peneliti sendiri yang mengalami, mengamati dan merumuskan pengambilan data tersebut.
2. Peneliti melacak, mengambil informasi adalah dari informan asli.
3. Informasi yang diakses benar-benar diakses secara mendalam dan terhindar dari informasi asal-asalan.

Faktor berharga bagi peneliti di lapangan adalah menghadapi berbagai budaya, karakter, suku manusia, orang senang dan tidak senang dengan peneliti, memanfaatkan peneliti sebagai sumber untuk meningkatkan keyakinan dan berusaha memanfaatkan momen tersebut sebagai ajang konflik. H. Moh. Kasiram mengungkapkan bahwa: “dalam berperan serta, peneliti hendaknya tetap bertindak sebagai stranger, sehingga tidak tenggelam kedalam konteks subjek peneliti, yang dapat mengurangi ketajaman observasi data yang dicari. Disamping , peneliti tetap berpegang pada fokus penelitian, sehingga data yang diambil cukup terkontrol dan berguna untuk dianalisis”. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh peneliti untuk mendapatkan data yang autentik, komprehensif dan akuntabel adalah:

1. Sebelum memasuki lapangan, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Desa Piasak dan Pengurus Kelompok Pengolah hasil perikanan

sekaligus menyiapkan segala yang terkait dengan pengambilan data seperti alat perekam, kamera dan semacamnya.

2. Peneliti menghadap pihak desa dan menyerahkan surat izin, memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian yang menjadi fokus penelitian.
3. Mengadakan pengamatan (observasi) di lapangan untuk memahami latar penelitian yang sebenarnya.
4. Menyusun jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan subjek penelitian.
5. Melaksanakan kunjungan untuk mengumpulkan data sesuai jadwal yang telah disepakati.

Ada beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan peneliti adalah memperhatikan, menghargai, menjunjung tinggi hak kepentingan informan, tidak melanggar kebebasan, menjaga privasi informan sekaligus tidak mengeksploitasinya, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan hasil laporan penelitian kepada informan atau pihak-pihak yang terkait. Moleong (2007) mengungkapkan bahwa sikap toleran, sabar, empati, pandangan yang baik, manusiawi, terbuka, jujur, objektif, penampilan menarik, mencintai pekerjaannya dalam meneliti (wawancara), senang berbicara, punya rasa ingin tahu, mau mendengarkan dan menghargai orang lain dalam berbagai aspek. Sedangkan peranan peneliti sebagai pengamat menurut Buford Junker, yaitu: (a). Berperan serta secara lengkap (menjadi anggota penuh di lapangan); (b). Pemeranserta sebagai pengamat

(pura-pura dan tak sepenuhnya berperan serta); (c). Pengamat sebagai pemeranserta (peran peneliti diketahui umum); (d) Pengamatan penuh (mengamati secara penuh dan subjek tidak menyadarinya, biasanya hal ini dilakukan dengan “one way screen” yaitu pengamatan lewat belakang kaca).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif di antaranya klasifikasi data, reduksi data, metode analisis dan pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Data dan Reduksi Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan reduksi data ada dua cara yaitu :

- a. Identifikasi satuan (unit) pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditentukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
- b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya berasal dari sumber mana.

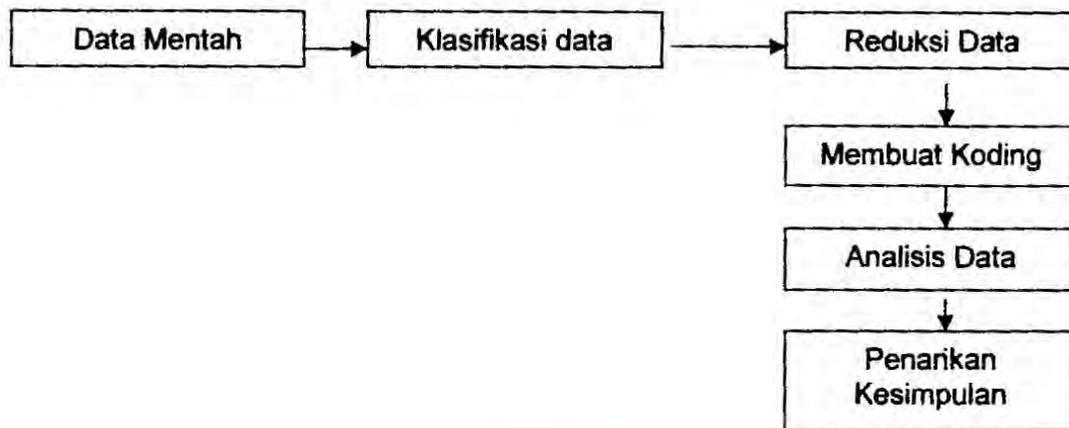
2. Metode Analisis dan Pembahasan

Analisis data dilakukan dengan dua (2) tahap, yaitu analisis data selama di lapangan dan analisis data setelah data terkumpul. Analisis data selama di lapangan tidak dikerjakan setelah pengumpulan data selesai melainkan selama pengumpulan data

berlangsung dan dikerjakan terus-menerus sehingga penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang merupakan hasil wawancara dengan informan kunci (*key person*) dipilah-pilah dan diberi kode berdasarkan kesamaan isu, tema dan masalah yang terkandung di dalamnya, dengan terus mencari data-data baru. Sedangkan analisis data setelah terkumpul atau data yang baru saja diperoleh setelah pelaksanaan pengumpulan data, maka dianalisis dengan cara membandingkannya dengan data yang terdahulu. Pemelihan kedua langkah analisis data tersebut didasarkan pada teori Bogdan dan Biklen, yang diterapkan oleh Mantja (1989).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini peneliti berupaya memadukan antara konsep satu dengan konsep lainnya kemudian dianalisis secara cermat dan tepat untuk menarik kesimpulan. Analisis data tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan hasil yang valid, autentik, komprehensif, reliabel, dan akuntabel, dan selanjutnya diolah dan di proses lebih lanjut sebagai data primer. Untuk memudahkan cara memahaminya, dapat disajikan skema analisis data sebagai berikut:



Gambar. 3.1 Teknik analisa data

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas secara singkat analisis data dilakukan sebagai berikut.

1. Mengklasifikasi seluruh data (data data) yang tersedia dari berbagai sumber (wawancara), pengamatan dan dokumentasi) setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah.
2. Melakukan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi (membuat ringkasan dan rangkuman inti dan pertanyaan-pertanyaan penting di dalamnya) dengan demikian reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan agar dikategorikan pada langkah-langkah selanjutnya. Kategori tersebut dibuat sambil melakukan koding (kode).
4. Menafsirkan data dalam mengelolah hasil penelitian. Barulah melakukan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Piasak merupakan salah satu dari tujuh belas desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan letak wilayah, Desa Piasak dikelilingi oleh dua Desa dalam wilayah Kecamatan Selimbau dan 2 Desa dalam wilayah Kecamatan Jongkong. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kandung Suli, sebelah timur dengan Desa Joki Hilir, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pega dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Nibung.

Tipologi Desa Piasak adalah termasuk tipologi Desa Terisolasi hal ini dikarenakan akses ke Desa Piasak adalah hanya menggunakan satu jalur yaitu hanya menggunakan jalur sungai. Kendaraan umum yang digunakan adalah *speed boat*, setiap hari ada walaupun tidak dalam hitungan tiap-tiap jam. Desa Piasak memiliki hawa yang sedang dengan keadaan suhu rata-rata 29 ° C dengan jumlah bulan hujan 5 bulan. Desa ini mempunyai topografi/bentang wilayah sebagian besar adalah datar.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan profil desa, Desa Piasak memiliki jumlah penduduk 1.590 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 486 KK. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih

banyak yaitu sebesar 832 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang sejumlah 758 jiwa. Gambaran komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat menunjukkan struktur yang ada didalam masyarakat. Untuk lebih jelas mengenai gambaran struktur komposisi jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Golongan Umur	Jml	Persentase %
1	Dibawah 12 tahun	325	20,44
2	13-15 tahun	130	8,18
3	16-18 tahun	123	7,74
4	19-25 tahun	146	9,18
5	26-35 tahun	200	12,58
6	36-45 tahun	256	16,10
7	46-50 tahun	252	15,85
8	51-60 tahun	100	6,29
9	61-65 tahun	50	3,14
10	Lebih dari 66 tahun	8	0,50
	Jumlah	1.590	100

Sumber: Profil Desa Piasak sampai bulan Mei 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah angkatan kerja atau usia produktif (16-60 tahun) adalah 1.077 jiwa atau setara 67,74 % yang harus menanggung kelompok usia non produktif (0-15 tahun dan usia 61 tahun keatas) sejumlah 513 jiwa atau 32,26 %. Penduduk usia dibawah 16 tahun dan usia di atas 60 tahun sering dianggap sebagai penduduk kurang produktif karena secara ekonomis masih tergantung dengan orang tua atau orang lain yang menanggungnya.

Secara garis besar penduduk dalam hubungan dengan kegiatan ekonomi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu (1) usia kurang dari

enam belas tahun, dan (2) usia enam belas tahun keatas. Penduduk yang berusia enam belas tahun keatas adalah usia kerja, dimana pada usia ini dianggap sebagai tenaga kerja potensial yang produktif untuk dimanfaatkan disemua sektor ekonomi untuk menggerakkan sumber – sumber produksi yang ada dalam menghasilkan barang dan jasa.

Tentunya dari sejumlah angkatan kerja di Desa Piasak tidak semuanya memiliki pekerjaan, dengan kata lain masih ada sejumlah angkatan kerja yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, minimnya tingkat pendidikan dan keterampilan, keterbatasan dana untuk modal usaha dan lain sebagainya. Dengan melihat komposisi mata pencaharian penduduk maka dapat diketahui sektor apa yang menjadi andalan masyarakat dalam menopang hidupnya serta diketahui pula kondisi sosial masyarakat lainnya seperti keterampilan, pendidikan maupun budaya yang dominan di masyarakat. Untuk lebih lengkapnya mengenai komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2 Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	160	10,06
2.	Nelayan	242	15,22
3.	Pembudidaya ikan	306	19,25
4.	Pedagang	10	0,63
5.	Pengolah Kerupuk Ikan	210	13,21
6.	Ibu Rumah Tangga	144	9,06
7.	PNS	32	2,01
8.	TNI/POLRI	4	0,25
9.	Aparat Desa	28	1,76
10.	Pelajar	356	22,39
11.	Lainnya	98	6,16
	JUMLAH	1.590	100

Sumber: Profil Desa Piasak sampai bulai Mei Tahun 2013

Mata pencaharian masyarakat Desa Piasak sebagian besar adalah bergerak dibidang perikanan yaitu sebesar 47,67 % baik berupa pembudidaya, nelayan maupun pengolah. Untuk kegiatan budidaya jenis usaha budidaya adalah usaha keramba, dengan jumlah keramba sebanyak 457 unit dengan produksi 114 ton/tahun.

B. Proses Pemberian Bantuan Peralatan Pengolahan di Desa Piasak

Berdasarkan hasil dan temuan dilapangan maka proses pelaksanaan pemberian bantuan peralatan pengolahan di Desa Piasak dapat dikelompokkan tiga tahap yaitu tahap pra-implementasi, implementasi dan pasca implementasi.

1. Tahap Pra-implementasi

Tahap Pra-implementasi bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan di Desa Piasak pada dasarnya di tandai dengan munculnya kesadaran masyarakat Pengolah akan permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu

semakin menurunnya produktivitas kerupuk ikan, dan kurangnya sarana dan prasarana memadai dalam pengolahan kerupuk ikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mantan kepala Desa Piasak (Ismail) beliau mengatakan bahwa:

Keinginan untuk menjadikan Desa Piasak sebagai sentra pengolahan kerupuk ikan ini adalah didasari dari keinginan masyarakat sendiri untuk memajukan daerah serta didukung juga oleh program dari Pemerintah, yang dalam hal ini sebagai instansi teknis adalah Dinas Perikanan. Permohonan kami langsung direspon positif oleh pihak Dinas Perikanan, dimana pada saat itu Kepala Dinas lagi dijabat oleh Bapak Drs. Abang Chairul Saleh, MM. Jadi pemerintah dalam memberikan bantuan peralatan memang atas usulan dan kebutuhan masyarakat Desa Piasak.

Munculnya kesadaran akan masalah, ancaman maupun peluang dalam masyarakat merupakan suatu misi utama masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka serta dalam upaya menjaga dan mempertahankan produksi kerupuk ikan di Desa Piasak. Bisa dikatakan bahwa pola pra-implementasi bantuan peralatan di Desa Piasak berasal dari permulaan internal, yaitu pola yang berasal dari “*bottom-up beginnings*” di mana inisiasi pelaksanaan bantuan dilakukan dari dalam komunitas dan *stakeholders* perikanan. Hal ini sejalan dengan Pendapat Pomeroy and Rivera Guieb (2006), bahwa dalam tahap pra-implementasi terdapat dua tipe permulaan yaitu permulaan internal di mana lebih banyak inisiasi yang berasal dari dalam komunitas dan *stakeholders* perikanan dan permulaan *eksternal* di mana inisiasi berasal dari luar komunitas dan *stakeholders* perikanan.

Selain muncul dari masyarakat lokal, kesadaran akan adanya berbagai permasalahan di Desa Piasak juga muncul dari pihak pemerintah, sehingga tahap ini telah terbangun hubungan atau komunikasi antara masyarakat dengan lembaga pemerintah. Hubungan ini ditandai dengan adanya proses penyampaian aspirasi, inisiatif dan gagasan terhadap pemerintah mengenai perlunya ditetapkan Desa Piasak sebagai Sentra Pengolahan Kerupuk ikan, selain itu perlunya dibangunnya sarana dan prasarana dalam mendukung pengolahan kerupuk ikan di Desa Piasak. Dalam rangka membantu mengarahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan inisiatif dan gagasan kepada pemerintah daerah khususnya instansi terkait yaitu Dinas Perikanan, peran tokoh-tokoh masyarakat dan aparat di Desa Piasak sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menghormati tokoh masyarakat ini, yang mereka anggap sebagai pelopor atau pemimpin yang dapat diteladani. Tokoh masyarakat yang dimaksud disini seperti: tokoh agama, kepala desa dll.

Walaupun inisiatif dan gagasan yang disampaikan hanya sebatas usulan tanpa suatu proposal yang jelas dan sistematis, namun sudah mengandung makna yang cukup signifikan dalam ikut mempengaruhi pembuat kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu mau memberi ruang bagi aspirasi, ide dan gagasan masyarakat di Desa Piasak, dalam rangka memperkuat hubungan keduanya, demikian pula hubungan personal antara masyarakat dengan aparat Pemerintah (Dinas Perikanan). Hubungan baik antara masyarakat

dengan pemerintah ini merupakan *social capital* yang sangat berarti dalam mendukung kerjasama yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan bersama. Hal ini mengandung makna bahwa hubungan yang baik antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau non pemerintah sangat dibutuhkan di setiap rangkaian proses penyaluran bantuan peralatan pengolahan. Hubungan semua pihak yang berkepentingan dalam sentra pengolahan tersebut harus selalu dijaga dan ditingkatkan untuk mencapai tingkatan yang sematang mungkin.

Untuk memperjelas pemahaman pada tahap pra-implementasi bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan di Desa Piasak berdasarkan analisa tersebut, maka disederhanakan melalui tabel di bawah ini :

Tabel. 4.3. Pra-Implementasi Pemberian Bantuan Peralatan

1.	Kesadaran akan adanya permasalahan terhadap produktivitas kerupuk ikan	Pertemuan ² untuk membicarakan masalah dan alternatif pemecahan	Tahun 2007
2.	Kemauan dan motivasi untuk bekerjasama dalam rangka menyelesaikan masalah penurunan produksi kerupuk ikan	Inisiasi dari masyarakat agar ditetapkannya Desa Piasak sebagai Sentra Pengolahan Kerupuk Ikan	Tahun 2007
3.	Keterbukaan pemda dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat	Penetapan Desa Piasak Sebagai Sentra Pengolahan Kerupuk Ikan	Tahun 2008

Sumber: Hasil penelitian dilapangan

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa pemberian bantuan peralatan pengolahan di Desa Piasak berdasarkan usulan dari masyarakat itu sendiri dan di dukung pula dengan kebijakan Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas perikanan menindaklanjuti keinginan masyarakat Desa Piasak karena berdasarkan informasi yang mereka sampaikan dan berdasarkan hasil pengamatan dilapangan memang mereka layak untuk dijadikan sentra pengolahan kerupuk ikan dan mereka layak untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Dengan itulah pemerintah daerah melakukan upaya-upaya agar dapat membantu para pengolah kerupuk ikan dalam peningkatan produksi kerupuk ikan. Upaya pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan produksi kerupuk ikan di Desa Piasak melalui pemberian bantuan peralatan dan membangun sentra pengolahan.

2. Tahap Implementasi

Tahap Implementasi, sebagai suatu proses pelaksanaan atau implementasi bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan dilaksanakan setelah tahap pra-implementasi dapat dilalui dengan baik, ini dapat dilihat pada indikator **tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pemerintah** untuk bersama-sama mengelola dan mengatasi permasalahan produksi kerupuk ikan yang ada di Desa Piasak. Terjalannya hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah ini dimulai dari adanya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah dalam hal penyampaian ide dan gagasan bagaimana meningkatkan produksi kerupuk ikan yang ada secara bersama-sama. Asumsi ini sesuai dengan apa yang dikatakan Edward III dalam Yousa (2007), mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

salah satunya adalah *Communication* (komunikasi), komunikasi sangatlah penting karena komunikasi diperlukan untuk membentuk persamaan tujuan dan kejelasan instruksi diantara para pelaksana kebijakan. Kemauan dan keterbukaan Pemda untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga melahirkan suatu kebijakan memberikan bantuan peralatan kepada kelompok pengolah kerupuk ikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Piasak (Basrun) beliau mengatakan bahwa:

Sehubungan dengan komunikasi antara Dinas Perikanan, Pihak Desa Piasak serta dengan kelompok pengolah kerupuk terjalin dengan baik. Baik itu komunikasi langsung maupun tidak langsung, komunikasi langsung yang kami maksudkan adalah kami ketemu langsung dengan pihak Dinas Perikanan. Dimana mereka sebelum menyalurkan bantuan selalu memberitahu terlebih dahulu kepada kami dengan cara mengumpul pihak Desa dan perwakilan dari masing-masing kelompok. Sedangkan komunikasi tidak langsung yang kami maksudkan adalah mereka memberitahu kami lewat komunikasi jarak jauh, yaitu komunikasi melalui hendpon.

Senada juga dengan yang disampaikan oleh mantan Kepala Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Ir. Istiwa, M.Si) beliau mengatakan bahwa:

Sebelum Dinas Perikanan memberikan bantuan peralatan, kami selalu mengkomunikasikan dengan pihak Desa dan pihak Kelompok tentang bantuan yang akan diberikan. Bantuan yang kami berikan juga berdasarkan usulan ataupun permintaan mereka, jadi soal komunikasi antara kami dan pihak desa piasak maupun dengan kelompok sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, tahap implementasi bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan ini dimulai dari kegiatan identifikasi potensi-potensi yang ada. Pada tahapan ini masyarakat dan pemerintah

secara bersama-sama melakukan kegiatan identifikasi lokasi untuk pembangunan lokasi sentra pengolahan dan mengidentifikasi kebutuhan peralatan yang diperlukan untuk menunjang operasional pengolahan kerupuk ikan.

Sehubungan dengan identifikasi potensi dan lokasi sentra pengolahan kerupuk ikan, mantan Kabid Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan (Ir. Istiwa, M.Si) mengatakan:

Bahwa sebelum penentuan lokasi dan pemberian bantuan di Desa Piasak terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap lokasi dan kebutuhan peralatan yang dibutuhkan oleh kelompok pengolah, sehingga pada saat penganggaran sudah tergambar apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kelompok pengolah.

Selanjutnya dalam proses implementasi bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan, juga dilakukan penguatan kelembagaan dan organisasi masyarakat. Kelembagaan ini berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mengawasi mutu kerupuk ikan yang diproduksi di Desa Piasak.

Hal diatas menunjukkan bahwa di dalam kelompok pengolah hasil perikanan di Desa Piasak, pemerintah menghargai kelembagaan atau organisasi masyarakat yang ada sehingga salah satu unsur akar budaya masyarakat lokal tersebut dapat terangkat dan dijadikan nilai-nilai yang mengatur proses penentuan kebijakan pemerintah. Kenyataan ini hampir selaras dengan apa yang disampaikan Nikijuluw (2002:148-158), bahwa dalam membangun dan mengembangkan organisasi masyarakat perlu

diketahui organisasi masyarakat apa saja yang tersedia, apa tujuannya, apa visi dan misinya, siapa yang menjadi keanggotaannya, bagaimana kegiatannya selama ini, dan adakah kegiatannya yang berhubungan dengan sumberdaya perikanan. Bila memang ada, maka organisasi tersebut bisa dikembangkan sebagai organisasi masyarakat yang memiliki tanggung jawab.

Selain dibentuknya organisasi pelaksana dengan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya, dalam implementasi pemberian bantuan peralatan tentunya akan selalu berhubungan dengan berbagai pihak yang terkait dalam kebijakan program tersebut. Sosialisasi program menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena akan dapat melahirkan kesatuan persepsi dan pemahaman antar pihak yang terlibat dalam kebijakan program pengembangan sentra pengolahan kerupuk tersebut yang kemudian akan tercipta suatu sikap dari pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pemberian bantuan peralatan pengolahan.

Untuk kelancaran kegiatan Pemberian bantuan peralatan pengolahan di Desa Piasak Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, hal ini dilaksanakan guna mendapatkan dukungan dari semua pihak khususnya masyarakat yang mempunyai keterlibatan langsung dalam proses pemberian bantuan, dengan disosialisasikannya kegiatan bantuan peralatan pengolahan diharapkan akan munculnya suatu pemahaman dan dukungan maksimal di

masyarakat Desa Piasak, lebih jauh bahwa dengan pemberian bantuan akan memperoleh hasil produksi yang maksimal.

Sehubungan dengan sosialisasi pemberian bantuan peralatan pengolahan, mantan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ir. Istiwa, M.Si) mengatakan :

“Bahwa sebelum dilaksanakan Pemberian bantuan peralatan pengolahan sangat perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi, sosialisasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terlibat baik langsung atau tidak dalam proses pelaksanaan pendataan, lebih jauh beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan dengan melaksanakan pertemuan tatap muka antara Pihak Dinas Perikanan, Pihak Desa Piasak dan Pihak Kelompok yang akan jadi sasaran program kegiatan pemberian bantuan”.

Sosialisasi sangat penting dilaksanakan sehubungan dengan implementasi suatu kebijakan, dengan sosialisasi akan dapat melahirkan kesatuan persepsi dalam pemahaman antara pihak yang terlibat dalam kebijakan Pendataan, yang selanjutnya akan tercipta suatu sikap dari pihak yang menjadi sasaran kegiatan, apakah akan mendukung atau tidak dari kegiatan Pendataan yang akan dilaksanakan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses implementasi di Desa Piasak dalam proses pemberian bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan yang ada sudah berjalan baik dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu bagaimana peningkatan produksi kerupuk ikan berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya

yang akan meningkatkan ketahanan daerah dalam menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Implementasi bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan, dari aspek pembagian sudah berjalan baik, ini ditandai dengan setiap pengolah sudah mendapatkan jatah masing-masing alat berupa dandang dan kuili pengukus kerupuk ikan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa peralatan yang dibantu kepada kelompok masih ada yang belum maksimal seperti peralatan penyimpan bahan baku ikan yaitu peralatan Freezer(kulkas pembeku). Peralatan Freezer (kulkas pembeku) yang telah diberikan kepada kelompok baru berjumlah 40 (empat puluh) unit, sedangkan idealnya setiap pengolah memiliki minimal 1 (satu) buah freezer. Jadi kekurangan freezer untuk masyarakat pengolah di Desa Piasak berjumlah 180 (seratus delapan puluh) unit.

Peralatan lain yang sangat dibutuhkan oleh pengolah adalah mesin pengadon bahan baku, selama ini masyarakat masih melakukan pengadonan dengan cara manual. Yaitu masih menggunakan tangan mereka untuk membolak balik adonan pembuatan kerupuk ikan. Kebijakan ini merupakan ide, gagasan, saran yang diajukan oleh masyarakat untuk mendukung proses pembuatan kerupuk ikan di Desa Piasak, karena bagaimanapun tujuan peningkatan produksi kerupuk ikan tidak akan tercapai tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout*

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effectto* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Abdul Wahab, 1997 : 67).

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan.

Implementasi rencana kegiatan yang dirumuskan secara bersama-sama antara masyarakat lokal dan pemerintah dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun dalam pengembangan Sumberdaya manusia di Desa Piasak. Pada tabel dibawah ini digambarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menunjang peningkatan produksi kerupuk ikan di Desa Piasak mulai dari 2008 – 2012.

Tabel .4.4. Proses pelaksanaan pemberian bantuan peralatan Pengolahan kerupuk ikan di Desa Piasak yang teridentifikasi

No	Uraian Kegiatan	Instansi	Tahun
1.	Identifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2008
2.	Sosialisasi Program Pengembangan Sentra Pengolahan Kerupuk Ikan di Desa Piasak Kabupaten Kapuas Hulu	Dirjen P2HP-DKP RI dan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2008
3.	Seminar Detail Design	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Tahun 2008
4.	Seminar Grand Design	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2009
5.	Sosialisasi pelaksanaan program pengembangan sentra pengolahan	Dirjen P2HP-DKP RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar dan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2009
6.	Penyaluran Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan melalui dana tugas perbantuan	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2010
7.	Penyaluran bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2011
8.	Penyaluran bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan melalui dana dekonsentrasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Tahun 2012
9.	Pembangunan rumah produksi pengolahan kerupuk ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Tahun 2012
10.	Penyaluran bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan melalui dana PUMP-P2HP	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2012

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2013

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai proses implementasi pelaksanaan proses pemberian bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan di Desa Piasak, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi

dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai “*policy performance*”, secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan masyarakat dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Piasak. Perubahan dalam taraf hidup dan kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “*policy outcome*” atau “*policy impact*”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi

sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

Sehubungan dengan sumber daya manusia (aparatur), Kepala Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mengatakan:

Bahwa sumber daya manusia (aparatur) yang ada di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memang kurang, tetapi menurut saya itu tidaklah menjadi kendala untuk kami dapat berbuat dalam menjalankan tugas. Saat ini di bidang Pengolahan dan pemasaran kami memiliki personil 8 (delapan) orang, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasi, dan 5 (lima) orang staf. Sedangkan staf PNS yang kami miliki hanya 1 (satu) orang, sedangkan yang 4 (empat) orang adalah staf honorer.

Berdasarkan hal tersebut diatas nampak bahwa di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dari jumlah memang sudah cukup tetapi dari segi keahlian atau keterampilan mereka mengalami kekurangan staf PNS, dimana mereka hanya memiliki 1 (satu) orang staf PNS. Untuk lebih jelas tentang jumlah personil yang ada pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel. 4.5. Daftar Pegawai pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Nama/NIP	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Wan Kusnadi, S.PKP NIP. 196008091988031004	Kabid P2HP	S1 Penyuluhan	PNS
2	Abang Supardi NIP. 196311121986031016	Kasi Pemasaran Hasil Perikanan	SMA	PNS
3	Miftahul Jannah, S.Pi NIP. 197505022003012001	Kasi Pengolahan Hasil Perikanan	S1 Perikanan	PNS
4	Hamidi, S.PKP NIP. 197310231994031004	Pelaksana pada Seksi Pengolahan	S1 Penyuluhan	PNS
5	Sumarni, S.Pi	Pelaksana pada Seksi Pemasaran	S1 Perikanan	Hono rer
6	A. Ahmad Edi Sateriadi, S.Pi	Pelaksana pada Seksi Pemasaran	S1 Perikanan	Hono rer
7	Wahyu Wahyudi, A.Md.Pi	PPTK	D3 Perikanan	Hono rer
8	Wan Jusmin	Pelaksana pada Seksi Pengolahan	SMA	Hono rer

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2013

Dari tabel diatas terlihatlah bahwa staf yang ada di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan lebih banyak staf yang masih honorer dibandingkan tenaga yang PNS. Jadi dari segi kualitas memang agak kurang memadai dalam menjalankan tugas pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebut.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan anggaran, Kepala Bidang Pengolahan dan

Pemasaran hasil Perikanan mengatakan:

Bahwa anggaran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pencapaian suatu target program, dengan didukung anggaran yang memadai pastilah kita akan mudah untuk merealisasikan keinginan masyarakat/kelompok. Untuk membantu kelompok yang ada disentra pengolahan yang ada di Desa Piasak, Dinas Perikanan masih mengandalkan anggaran dari APBN. Sedangkan untuk anggaran APBD kami bagi kegiatan kepada kelompok-kelompok yang ada di Kecamatan lain, seperti di Kecamatan Jongkong, Bunut Hilir dan Embaloh Hilir.

Berdasarkan hasil tersebut diatas untuk membantu kelompok yang ada di sentra Desa Piasak, Dinas Perikanan mengandalkan dari dana APBN (tugas pembantuan/dekonsentrasi). Sedangkan dana untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok pengolah hasil perikanan pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sangat minim. Untuk anggaran biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan bagi kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada tahun anggaran 2012 dalam satu tahunnya hanya memiliki anggaran sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok yang ada diseluruh Kabupaten Kapuas Hulu (23 Kecamatan), berdasarkan jarak dari masing-masing Kecamatan yang agak berjauhan sebenarnya anggaran tersebut tidaklah mencukupi untuk melakukan pembinaan terhadap semua kelompok. Khususnya untuk kelompok yang ada di Desa Piasak, Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu hanya dapat melakukan 2 (dua) kali pembinaan dalam satu tahun, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Dari itulah sumber daya anggaran sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kegiatan.

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi. Peralatan yang tidak memadai akan memperlambat proses percepatan produksi. Sehubungan dengan Sumber daya peralatan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Pengolahan Hasil Perikanan yaitu :

“Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”.

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Hal ini senada dengan pendapat Edward III (1980:103) menegaskan bahwa kewenangan

(authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

3. Tahap Pasca Implementasi

Pasca implementasi merupakan tahap pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi menjadi elemen paling utama dari keseluruhan implementasi bantuan di Desa Piasak. Karena dengan evaluasi maka kelemahan dan Keberhasilan dari Proses penyaluran bantuan peralatan dapat diketahui, selain itu hasil evaluasi juga bisa merupakan umpan balik bagi pembaharuan dan perbaikan program kedepan. Evaluasi ini seyogyanya dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Pameroy and Rivera Guieb (dalam Abdul Hamid, 2011:90), bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta pemegang kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan di Desa Piasak sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, walaupun dalam hal pemantauan dan evaluasi bantuan peralatan di Desa Piasak, masyarakat atau *usergrup* yang lebih banyak dalam hal pemantauan dan evaluasi. Hal ini ditandai oleh Pelaksanaan Rapat Kelompok setiap tahun oleh masyarakat Desa Piasak. Pelaksanaan Rapat Kelompok ini biasanya dihadiri hampir seluruh anggota

kelompok pengolah hasil perikanan di Desa Piasak. Dalam rapat ini wacana yang diangkat yaitu mengenai evaluasi terhadap peningkatan produksi kerupuk dengan tetap harus menjaga mutu produk serta mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyediaan bahan baku.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa dengan adanya bantuan peralatan di Desa Piasak ada terdapat beberapa hal yang menarik untuk peneliti tulis, hal tersebut adalah: a. Kelompok dan tenaga kerja, b. Kondisi Lingkungan tempat pengolahan kerupuk ikan, c. Produksi, dan d. Mutu kemasan produk.

Pertama, Kelompok dan Tenaga kerja. Didaerah penelitian terdapat 21 kelompok pengolah, dengan jumlah anggota mencapai 210 orang. Pengolahan kerupuk ikan yang ada di Desa Piasak merupakan sentra pertama yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, karena di Desa Piasak jumlah pengolah kerupuk ikan sangat dominan dibandingkan dengan tempat lain. Dengan adanya bantuan peralatan pengolahan pada kelompok pengolahan yang ada di Desa piasak maka tidak mempengaruhi terhadap penambahan jumlah kelompok baru yang ada di Desa Piasak , hal ini disebabkan karena bantuan ini fokus kepada kelompok yang sudah ada.

Dengan adanya bantuan peralatan ini malahan mempengaruhi terjadinya penambahan penggunaan tenaga kerja harian untuk melakukan pengolahan, baik itu dalam proses pembuatan adonan maupun dalam proses pengirisan kerupuk itu sendiri. Sehubungan dengan penambahan tenaga kerja, Sekretaris Kelompok (Alpian) mengatakan :

“Bahwa dengan adanya bantuan peralatan dari Pemerintah ada sebagian kelompok memerlukan penambahan tenaga kerja harian, hal ini disebabkan adanya penambahan peralatan. Jumlah penambahan tenaga kerja harian biasanya antara satu atau dua orang, tapi ada juga yang tidak. Hal ini dipengaruhi tergantung produksi, bila produksinya banyak maka seorang pengolah tidak dapat bekerja sendirian maka ia memerlukan penambahan tenaga yang dapat membantunya.

Penambahan tenaga kerja disini dipengaruhi oleh adanya penambahan peralatan, hal inilah yang menyebabkan mereka memerlukan tenaga yang digaji secara harian. Pengolah kerupuk ikan yang ada di Desa Piasak sebagian juga sebagai nelayan yang pekerjaannya sehari-harinya menangkap ikan. Pengolah kerupuk ada juga yang merangkap sebagai petani, karena di Desa Piasak banyak juga masyarakat yang bekerja sebagai petani karet. Yang mana pada saat pagi hari masyarakat menoreh getah dahulu, sepulang dari menoreh getah barulah masyarakat melakukan pengolahan kerupuk ikan.

Sehubungan dengan penambahan tenaga kerja, biasanya mereka memerlukan tenaga harian untuk membantu mereka dalam melakukan pemotongan kerupuk dan melakukan pengadonan. Masyarakat di Desa Piasak setelah terjadi kenaikan harga bahan baku agak mengurangi jumlah produksi memproduksi kerupuk ikan. Jadi pada saat memproduksi kerupuk, mereka langsung memproduksi dalam jumlah yang relatif banyak dari biasanya. Sehingga memerlukan tenaga tambahan yang di gaji secara harian.

Kedua, Kondisi Lingkungan Tempat Pengolahan Kerupuk Ikan.
Kondisi lingkungan disekitar tempat masyarakat mengolah kerupuk ikan

pada umumnya terlihat bersih, karena masyarakat Desa Piasak pada umumnya masih melakukan pengolahan kerupuk ikan dirumah masing-masing. Dengan demikian sisa bahan baku dari ikan dapat dimanfaatkan sebagai lauk bagi anggota keluarganya, jadi permasalahan limbah dari bahan baku tidak menjadi kendala bagi masyarakat dalam membuangnya. Oleh sebab itu lingkungan tempat melakukan pengolahan kerupuk ikan tetap terjaga kebersihannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris kelompok (Alpian) mengatakan:

“Bahwa lingkungan tempat mengolah kerupuk ikan selalu terjaga dengan baik, hal ini disebabkan karena pada umumnya mereka masih mengolah kerupuk ikan ditempat tinggal mereka masing-masing. Bangunan yang dibangun oleh pemerintah untuk dijadikan sentra pengolahan belum memadai, karena belum cukup untuk menampung semua pengolah untuk dipindahkan kelokasi sentra”.

Lingkungan tempat pengolahan kerupuk ikan yang ada di Desa Piasak terpelihara dengan baik, hal ini dikarenakan oleh tempat mereka mengolah merupakan tempat tinggal mereka. Jadi setelah mereka selesai melakukan pengolahan kerupuk ikan tempat tersebut langsung dibersihkan. Begitu juga dengan peralatan produksi mereka, setelah mereka menggunakan peralatan tersebut langsung mereka bersihkan. Karena apabila tidak dibersihkan maka peralatan itu akan mudah karat dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Ketiga, adalah Produksi. Pengolahan kerupuk ikan yang ada di Desa Piasak melakukan pengolahan sepanjang tahun, produksi sendiri tergantung ketersediaan bahan baku. Kesulitan bahan baku terjadi ketika pasokan ikan menurun sehingga menyebabkan harga ikan naik. Pada

kondisi ini pengolah kerupuk mengalami penurunan pasokan ikan karena jumlah produksi ikan yang menurun tersebut lebih banyak dialihkan untuk konsumsi sehari-hari secara langsung.

Pada musim hujan terjadi penurunan jumlah produksi dan penurunan mutu produk. Penurunan jumlah produksi dikarenakan kurangnya sinar matahari yang menghambat proses penjemuran. Kendala produksi di atas biasanya diantisipasi oleh Pengolah dengan memproduksi dalam jumlah yang besar pada musim kemarau untuk stok musim hujan, karena pada musim hujan terjadi kenaikan harga kerupuk yang diakibatkan oleh jumlah permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh produsen seperti hari-hari biasanya.

Sehubungan dengan produksi kerupuk ikan di Desa Piasak, Bapak Alpian (pengolah) mengatakan:

“Bahwa produksi kerupuk ikan di Desa Piasak mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya hasil tangkapan ikan di alam. Sehubungan dengan produksi ini juga ada kaitannya juga dengan wadah penyimpanan bahan baku yang dimiliki oleh pengolah yang belum memadai. Sebenarnya masalah produksi ini dapat di atasai apabila semua pengolah memiliki wadah penyimpanan bahan baku berupa freezer. Dimana kalau pengolah memiliki peralatan penampung, maka mereka dapat menyetok bahan baku dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga pada musim ikan kurang mereka masih tetap memiliki bahan baku untuk produksi kerupuk”.

Sehubungan dengan itu juga Kasi Pengolahan Hasil Perikanan mengatakan bahwa:

“Penurunan produksi kerupuk ikan di Desa Piasak dipengaruhi oleh lemahnya kelembagaan serta dipengaruhi oleh pada saat musim panen ikan pengolah belum dapat menampung ikan tersebut, sehingga pada saat panen ikan kurang menjadi kendala dalam penyediaan bahan baku ikan. Produksi ini juga dipengaruhi oleh bahan baku tepung tapioka yang semakin mahal, sehingga produksi kerupuk menurun”.

Untuk mempermudah dalam melihat jumlah produksi kerupuk ikan di Desa Piasak, berikut kami tampilkan pada tabel 4.5. dibawah ini:

Tabel. 4.6. Produksi Kerupuk Ikan di Desa Piasak tahun 2009 s/d 2012

No	Kelompok	Produksi (Kg)			
		Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012
1	2	3	4	5	6
1.	Putri Pangeran	22.800	20.700	20.300	16.500
2.	Putri Bulan	17.600	16.850	20.000	16.000
3.	Arwana	15.600	12.700	14.600	11.650
4.	Pelangi	28.900	22.300	24.800	22.500
5.	Bintang	28.600	22.850	23.700	22.450
6.	Rahmat	34.400	30.450	27.200	24.300
7.	Cendrawasih	18.200	15.350	14.100	11.500
8.	Merpati	19.100	15.650	15.300	12.900
9.	Rajalawi	21.450	18.600	19.400	17.650
10.	Purnama	19.540	16.300	16.200	14.050
11.	Cinta kasih	6.000	5.850	6.650	6.200
12.	Usaha Jaya	30.000	25.100	21.400	15.200
13.	Harapan Jaya	23.500	21.150	18.100	17.000
14.	Teratai	14.650	13.350	12.300	9.800
15.	Melati	23.640	18.650	18.200	15.950
16.	Mawar	15.900	13.800	13.800	13.300
17.	Mentari	18.700	14.400	14.000	12.900
18.	Fajar	9.350	7.600	7.700	7.400
19.	Usaha maju	19.800	15.200	14.000	13.200
20.	Makmur abadi	20.400	19.100	15.200	14.400
21.	Anggrek	23.900	20.250	20.600	19.600
Jumlah		432.030	366.200	357.550	314.450

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2013

Dari tabel tersebut diatas terlihat terjadinya penurunan produksi dari tahun ketahun, hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya hasil produksi tangkapan ikan dialam serta semakin mahalnya bahan baku tepung tapioka di kalangan pengolah.

Keempat, adalah Kualitas Kemasan Produk. Kualitas merupakan keadaan produk yang berhubungan dengan barang maupun jasa berupa kinerja, keandalan, keistimewaan, keawetan, dan keindahan yang memenuhi bahkan melebihi harapan seseorang. Secara umum kualitas merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk menguasai pasar. Sedangkan bagi masyarakat kualitas adalah alat ukur sekaligus cara seseorang dalam mencapai kepuasan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lupiyoadi (2001:158) yang menyatakan bahwa “ Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas”. Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan/ tersirat”.

Mengenai Kualitas kemasan Produk yang ada di sentra produksi, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Pengolah (bapak Ade Mahroni) mengatakan:

“Kualitas Produk kerupuk ikan yang ada di Desa Piasak menjadi agak lebih baik dari segi pengemasannya, hal ini dikarenakan adanya bantuan peralatan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Dimana pada saat dahulu masyarakat hanya membungkus kerupuk ikan dengan kantong plastik biasa yang mana hanya dengan mengikat bagian ujungnya. Tapi sekarang kami sebagai pengolah tidak banyak yang menggunakan kemasan yang model bungkus biasa, kami sudah

bisa menggunakan Hand Seeler sebagai perekat bungkus kemasan. Hand seeler ini bantuan dari Dinas Perikanan, tiap kelompok kami sudah mendapatkan masing-masing ada 3 (tiga) buah Hand Seeler. Bantuan ini sangat membantu kami dalam melakukan pengemasan produk kerupuk ikan di Desa Piasak”.

Lebih lanjut lagi berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok Putri Bulan (Herlena) mengatakan bahwa:

Kemasan produk kami saat ini memang sudah mengalami peningkatan dengan adanya bantuan peralatan berupa hand seeler, tetapi kami ada beberapa kendala yang kami hadapi dari segi pengemasan. Hal ini dikarenakan oleh mahalnya harga kemasan ditingkat pengolah, apa lagi kalau kemasan itu sudah ada merk. Biaya sablon kemasan kami masih ketergantungan dengan tukang sablon yang ada di Pontianak. Masyarakat pengolah yang ada di Desa Piasak sangat memerlukan adanya bantuan mesin sablon kemasan, supaya kami tidak perlu jauh untuk melakukan pemesanan sablon kemasan kerupuk ikan.

Pada dasarnya tujuan dilaksanakannya proses produksi adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen baik dalam hal selera maupun kegunaannya. Salah satu aspek yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah dengan memperhatikan kualitas yang benar-benar sesuai dengan keinginan konsumen.

Dalam pemasaran, definisi produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk, melainkan satu paket kepuasan yang didapat dari pembelian produk kepuasan tersebut merupakan akumulasi kepuasan fisik, psikis, simbolis, dan pelayanan yang diberikan oleh produsen.

Produk identik dengan barang. Dalam akutansi, barang adalah fisik yang tersedia dipasar. Sedangkan produk yang tidak berwujud disebut jasa. Dalam manajemen produk, identifikasi dari produk adalah barang dan jasa yang di tawarkan kepada konsumen. Kata produk digunakan untuk tujuan mempermudah pengujian pasar dan daya serap pasar, yang akan sangat berguna bagi tenaga pemasaran, manajer, dan bagian pengendalian kualitas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Philip Kotler yang diterjemahkan oleh Juhardi (2000:84), bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan/ kebutuhan”.

Sedangkan menurut Stanton dalam Alma (2004:139), memberikan definisi produk sebagai berikut :

“Produk adalah seperangkat atribut yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk didalamnya warna, harga, nama baik produk, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan kebutuhan dan keinginan”.

Berdasarkan definisi diatas produk dapat dikatakan sebagai fokus inti dari semua bisnis. Produk adalah apa yang dilakukan perusahaan mulai dari mendesain, mengadakan sistem produksi dan operasi, menciptakan program pemasaran, sistem distribusi, iklan dan mengarahkan tenaga penjual untuk menjual. Sedangkan bagi konsumen, produk identik dengan perusahaan. Bagi pesaing, produk adalah sasaran yang harus dikerahkan.

Kualitas produk adalah salah satu faktor yang paling diandalkan oleh seorang pemasar dalam memasarkan suatu produk. Maka dari uraian

diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang saling berhubungan meskipun dapat memiliki definisi yang berbeda tetapi produk pada intinya memiliki suatu spesifikasi terhadap suatu barang dan/ atau jasa yang dapat menimbulkan kepuasan yang memenuhi atau melebihi harapan bagi konsumen yang menggunakannya.

Ditingkat Pemerintah Daerah kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan dan upaya peningkatan produksi kerupuk ikan ini, biasanya dihadiri oleh Aparat Desa Selaku Pemerintah ditingkat bawah. Dinas Perikanan selaku salah satu *stakeholder* Pelaksanaan Pembinaan dan evaluasi dalam setahun ada empat kali pembinaan. Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi di Desa Piasak menurut Kasi Pengolahan Hasil Pemasaran sebagai berikut:

“Pembinaan ini biasanya dilakukan oleh tim pembina dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dihadiri hampir seluruh pengolah kerupuk ikan di Desa Piasak. Dalam satu tahun pembinaan dan evaluasi di Desa Piasak biasanya dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun, dalam pembinaan ini yang diangkat yaitu mengenai evaluasi terhadap produksi, perbaikan mutu kemasan produk, pelarangan penggunaan produk-produk berbahaya, rencana-rencana aksi lainnya dalam kegiatan peningkatan produksi serta mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat”.

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, mempunyai tujuan untuk melihat apakah kegiatan pelaksanaan bantuan peralatan pengolahan di Desa Piasak sudah berjalan dan sesuai dengan tujuan awal dari upaya peningkatan produksi kerupuk ikan.

Kriteria-kriteria yang dilihat adalah Produktivitas, Keberlanjutan dan Pemerataan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, hal ini sejalan dengan pendapat Nikijuluw (2002:194) bahwa kriteria suatu sistem ditentukan oleh kinerja pelaksanaan dan penerapan sistem berdasarkan pada kriteria tertentu, seperti Efisiensi (*produktivitas*), Keberlanjutan dan Pemerataan.

C. Faktor yang mempengaruhi efektifitas pemanfaatan peralatan bantuan di Desa Piasak

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab I, dimana setelah mengetahui proses dan mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan peralatan di Desa Piasak serta bagaimana peran Pemerintah dalam mendorong keberhasilan pengelolaan, maka tujuan penelitian yang akan dibahas selanjutnya adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas pemanfaatan peralatan bantuan di Desa Piasak.

Berdasarkan hasil dan temuan dilapangan maka faktor yang mempengaruhi efektifitas pemanfaatan peralatan bantuan Di Desa Piasak dapat dikelompokkan dalam empat faktor, yaitu: 1. Fasilitas produksi; 2. Peralatan; 3. Bahan baku; 4. Tenaga kerja; dan 5. Teknologi.

1. Fasilitas Produksi

a. Bangunan untuk proses produksi

Bangunan digunakan untuk aktivitas proses produksi yang meliputi penyiapan bahan baku, pembuatan adonan, pencetakan,

pengukusan, pendinginan, pemotongan, pengeringan/ penjemuran dan penyimpanan. Luas lahan yang digunakan tergantung pada jenis dan banyaknya fasilitas yang dimiliki atau dengan kata lain skala usaha yang dimiliki.

Lay out tempat produksi diatur sesuai dengan urutan tahap-tahap produksi. Hal ini memudahkan untuk proses pemindahan barang dari masing-masing tahap. Ruang untuk tempat pemotongan misalnya merupakan ruangan yang langsung tembus ke lahan penjemuran untuk memudahkan proses pengangkutan kerupuk setelah dipotong untuk selanjutnya dijemur. Gudang penyimpanan *output* disesuaikan dengan jumlah produksi.

Sehubungan dengan fasilitas bangunan untuk produksi, Bapak Ade Mahroni (masyarakat pengolah) mengatakan bahwa:

“Masyarakat pengolah masih belum memiliki bangunan khusus untuk melakukan pengolahan secara terpadu, selama ini masyarakat masih menggunakan fasilitas bangunan rumah tinggal untuk melakukan produksi kerupuk ikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan masyarakat untuk membangun bangunan untuk produksi yang sesuai dengan standar”.

Sehubungan dengan fasilitas untuk pengolahan kerupuk ikan yang ada di Desa piasak, pada dasarnya kelompok belum memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan aktivitas proses produksi. Fasilitas yang ada baru 3 (tiga) lokal untuk proses produksi dan itupun belum dimanfaatkan oleh masyarakat pengolah, menurut mereka

fasilitas itu masih takut menimbulkan kecemburuan apabila fasilitas itu diberikan kepada salah satu kelompok.

Sehubungan dengan fasilitas yang baru ada 3 lokal, kasi pengolahan hasil perikanan mengatakan:

Bahwa pemerintah pusat tidak akan melanjutkan pembangunan lokal sentra apabila bangunan yang sudah ada tidak dimanfaatkan. Beliau juga mengatakan bahwa permasalahan belum ditematinya sentra yang sudah ada disebabkan belum adanya jaringan listrik.

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2009 telah merencanakan untuk pembangunan sentra pengolahan kerupuk ikan di Desa Piasak Kecamatan Selimbau melalui sumber dana APBN sebesar Rp. 2.495.000.000,- tetapi sampai saat ini hal itu belum terealisasi sepenuhnya. Bangunan yang direncanakan ataupun yang diusulkan oleh masyarakat Desa Piasak dan Dinas perikanan berjumlah 22 (dua puluh dua) pintu tetapi yang baru terealisasi baru 3 (tiga) pintu. Hal ini juga yang mempengaruhi efektifitas pemanfaatan bantuan peralatan pengolahan yang ada di Desa Piasak.

b. Lahan penjemuran/lantai jemur

Lahan penjemuran/lantai jemur kerupuk ini biasanya memerlukan tempat yang cukup luas, supaya dalam proses pengeringan kerupuk bisa lebih cepat dan banyak. Berdasarkan hasil temuan dilapangan fasilitas untuk menjemur kerupuk ikan di Desa Piasak masih sangat minim, dimana mereka menjemur kerupuk masih menggunakan

fasilitas jalan. Sehubungan dengan lantai jemur, berdasarkan hasil wawancara bapak Alpian (masyarakat pengolah) mengatakan bahwa:

“Fasilitas untuk menjemur kerupuk yang ada di Desa Piasak sangat minim, dimana masyarakat pengolah masih banyak menjemur kerupuk mereka di jalanan. Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu pernah membangun lantai jemur untuk masyarakat pengolah sebanyak 3 unit, tetapi bantuan pemerintah tersebut belum mampu untuk menampung produksi yang ada di Desa Piasak”.

Lahan penjemuran sangatlah menentukan dalam proses produksi kerupuk ikan, karena kerupuk memerlukan lahan yang cukup luas agar proses pengeringan berjalan dengan efektif. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan pembangunan lantai jemur untuk masyarakat Desa Piasak berjumlah 3 lokasi yaitu: 1. Di Dusun bawak dengan ukuran panjang 20 m x lebar 10 m = 200 m², 2. Di Dusun Pangeran dengan ukuran panjang 20,5 m x lebar 10 m = 205 m² dan 3. Di Dusun Tanjung Harapan dengan ukuran panjang 18,8 m x lebar 9,5 m = 178,6 m² tetapi dengan jumlah pengolah yang cukup banyak lantai jemur bantuan Dinas Perikanan belumlah cukup. Jadi mereka masih tetap melakukan penjemuran kerupuk ikan tersebut di jalan umum, apabila lantai jemur tersebut telah penuh terisi oleh para pengolah yang lain.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu ketua kelompok pengolah “Putri Pangeran” bernama Dayang Rahmah mengatakan bahwa:

Lantai jemur bantuan pemerintah daerah memang membantu sebagian masyarakat tetapi belum mampu menampung produksi kerupuk ikan dalam jumlah yang lebih banyak, karena lantai jemur tersebut umumnya digunakan oleh orang yang dekat rumahnya saja. Orang yang rumahnya jauh dari tempat bangunan lantai jemur biasanya tidak mau menjemur ketempat bangunan yang telah dibuat karena alasan kejauhan.

2. Peralatan

Dari hasil penelitian di lapangan mulai dari alat pengaduk/pencampur yang masih sangat sederhana, termasuk alat perebus yang juga masih sangat sederhana yaitu panci besar yang seringkali tidak dapat menghasilkan tingkat kematangan yang sama pada saat perebusan. Sedangkan alat potong manual yang digunakan terbuat dari pisau yang dimodifikasi secara sederhana, sehingga akurasi pemotongan untuk menghasilkan kerupuk dengan ketebalan yang hanya 1 mm tidak tercapai, dan bahkan ketebalan yang dihasilkan juga tidak pernah sama ukurannya. Selanjutnya alat pengepakan yang digunakan sebagian besar masih dilakukan dengan cara membungkus dalam plastik biasa, kemudian dimasuki label pada secarik kertas yang kurang memenuhi aspek estetika sehingga kurang menarik bagi para pembeli. Berbeda sekali dengan penampilan produk dari industri menengah yang ada di Kota-kota seperti produk kota Pontianak yang rata-rata telah memiliki pangsa pasar cukup besar.

Peralatan *home industry* berpengaruh positif terhadap kondisi lingkungan. Karena dengan menggunakan peralatan yang lebih baik, akan mengurangi residu kerusakan hasil produksi. Dengan demikian

penggunaan peralatan yang baik dapat mengurangi pencemaran lingkungan sehingga kualitas lingkungan dapat ditingkatkan, artinya agar diupayakan lebih banyak penggunaan peralatan *home industry* yang berkualitas. Hal itu dapat diterima juga karena dengan penggunaan peralatan yang lebih baik maka secara umum dapat menurunkan waktu yang digunakan untuk proses pembuatan kerupuk ikan dan dapat mengurangi dampak lingkungan. Salah satunya sebagaimana dikemukakan oleh Afrianto dan Liviawaty (dalam Sampono, 2007:56) apabila proses pengeringan tidak dilakukan dengan sempurna (misalnya hanya mengandalkan sinar matahari) akan menyebabkan produksi jelek atau rusak yang ditandai dengan adanya jamur pada kerupuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu lingkungan. Hal tersebut juga selaras dengan teori Stooner (dalam Sampono, 2007:56) tentang produktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, perilaku sosial, produksi dan tenaga kerja.

Sehubungan dengan peralatan produksi kerupuk ikan, bapak Alpian (Pengolah) mengatakan:

“Bahwa masyarakat pengolah kerupuk ikan di Desa Piasak masih menggunakan peralatan sederhana, peralatan dengan teknologi modern belum ada yang digunakan oleh masyarakat pengolah di Desa Piasak”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kasi Pengolahan Hasil Perikanan tentang bantuan peralatan yang diberikan kepada pengolah di Desa Piasak, beliau mengatakan:

“Bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah menyalurkan bantuan kepada kelompok pengolah hasil perikanan di Desa Piasak berupa peralatan seperti: Kualii, Dandang, hend seller, freezer dan mesin penggiling ikan”.

Untuk lebih jelas tentang peralatan yang diberikan oleh dinas perikanan terhadap kelompok pengolah desa piasak, berikut kami sampaikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 4.7. Bantuan Peralatan Dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk pengolah Desa Piasak dari tahun 2010 s/d 2012

No	Penerima	Nama Peralatan	Jumlah (unit)	Thn
1.	Kelompok	- Dandang Pengukus	- 130	2010
	Pengolah	- Wajan/Kualii	- 130	
	Desa Piasak	- Hand Sealer	- 72	
2.	Kelompok	- Dandang Pengukus	- 90	2011
	Pengolah	- Wajan/kualii	- 90	
	Desa Piasak	- Mesin Penggiling Ikan	- 13	
3.	Kelompok	- Frezeer	- 10	2012
	Pengolah	- Mesin Penggiling	- 14	
	Desa Piasak	ikan		

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013

Sehubungan dengan bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu kepada pengolah Desa Piasak berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok gabungan (bapak Fajarudin) mengatakan:

“Bahwa bantuan peralatan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sangatlah membantu masyarakat pengolah dalam melakukan produksi kerupuk mereka terutama pada bantuan kualii dan dandang pengukus kerupuk, tetapi mereka masih ada mengalami kesulitan dalam penyimpanan bahan

baku ikan. Karena tidak semua pengolah memiliki freezer, dalam melakukan pengolahan kerupuk ikan, freezer merupakan peralatan yang sangat diperlukan oleh pengolah. Dimana bahan baku ikan tersebut yang mudah mengalami kerusakan mutu daging ikan kalau tidak disimpan ditempat yang dingin. Idealnya satu pengolah minimal memiliki 1 (satu) buah freezer, supaya pada musim tangkapan ikan banyak mereka dapat menyetok bahan baku ikan”.

Seperti kita ketahui bahwa ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (membusuk). Hanya dalam waktu 8 jam sejak ikan ditangkap dan didaratkan sudah akan timbul proses perubahan yang mengarah pada kerusakan. Karena itu agar ikan dan hasil perikanan lainnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, perlu dijaga kondisinya.

Sehubungan dengan bantuan peralatan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat pada gambar 4.1. dibawah ini:



A. Dandang

B. Kual



C. Freezer



D. Mesin Penggiling

E. Hand Seeler

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 2013

Gambar 4.1. Peralatan Bantuan Dinas Perikanan

3. Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan adalah :

a). Ikan

Ikan yang biasanya digunakan sebagai bahan baku adalah jenis ikan Belidak, Toman, gabus atau ikan campur (ikan kecil).

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, kebutuhan berbagai jenis ikan untuk pembuatan kerupuk ikan adalah sebanyak 250.000 kg/tahun. Kebutuhan dalam jumlah tersebut, ternyata tidak dapat dipenuhi sendiri oleh nelayan di Kecamatan Selimbau. Dengan demikian maka perlu mendatangkan bahan baku ikan dari tempat lain.

Sehubungan dengan bahan baku ikan untuk pengolahan kerupuk ikan di Desa Piasak, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ujang Sah Dani mengatakan:

“Bahwa pada musim tangkapan ikan banyak pengolah tidak

mengalami kesulitan bahan baku ikan, tapi apabila pada musim tangkapan ikan berkurang maka pengolah akan kesulitan juga untuk mendapatkan bahan baku ikan. Hal ini disebabkan masyarakat masih mengandalkan bahan baku dari hasil tangkapan dari alam. Hasil dari budidaya belum mampu menutupi kebutuhan akan bahan baku ikan pada saat hasil tangkapan berkurang”.

Sehubungan dengan hasil tangkapan ikan juga sangat dipengaruhi oleh peralatan yang dimiliki oleh nelayan untuk melakukan tangkapan ikan di alam, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh salah satu nelayan di Desa Piasak yang bernama Deden Supriadi mengatakan bahwa:

Nelayan di Desa Piasak masih melakukan penangkapan menggunakan peralatan yang seadanya seperti bubu, jala, rawai dan pukat. Untuk mendukung nelayan di Desa Piasak belum pernah ada bantuan peralatan tangkap yang di berikan oleh Pemerintah terhadap nelayan. Sebenarnya nelayan di Desa Piasak sangat mengharapkan bantuan alat tangkap, supaya alat tangkap kami yang sudah tidak layak pakai bisa digantikan dengan yang baru.

Kesulitan bahan baku terjadi ketika pasokan ikan menurun sehingga menyebabkan harga ikan naik. Pada kondisi ini pengusaha kerupuk mengalami penurunan pasokan ikan karena jumlah produksi ikan yang menurun tersebut lebih banyak dialihkan untuk konsumsi sehari-hari secara langsung. Di pihak lain pengolah tidak dapat menaikkan harga sesuai dengan kenaikan harga bahan bakunya karena tidak dapat mempengaruhi harga kerupuk ikan di pasar. Hal inilah yang menyebabkan pengolah mengurangi jumlah produksinya.

Pada musim hujan terjadi penurunan jumlah produksi dan penurunan mutu produk. Penurunan jumlah produksi dikarenakan kurangnya sinar matahari yang menghambat

proses penjemuran. Meskipun pengeringan kerupuk dapat dilakukan dengan oven (*dryer*), tetapi jumlah produk yang dihasilkan juga sedikit sebab mutunya tidak sebgus dengan pengeringan dengan sinar matahari. Sedikitnya sinar matahari pada musim hujan juga menurunkan mutu kerupuk karena harus dijemur sehari-hari.

Kendala produksi di atas biasanya diantisipasi oleh pengolah dengan memproduksi dalam jumlah yang besar pada musim kemarau untuk stok musim hujan, karena pada musim hujan terjadi kenaikan harga kerupuk yang diakibatkan oleh jumlah permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh produsen seperti hari-hari biasanya.

b). Tepung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan Bahan baku utama yang diperlukan dalam pembuatan adonan adalah tepung terigu dan tapioka. Kebutuhan tepung terigu dan tapioka yang digunakan untuk pembuatan kerupuk ikan tercatat sebanyak 245.000 kg per tahun dengan nilai sebesar Rp. 1.666.000.000,-. Tepung terigu dan tapioka disuplai oleh pedagang yang ada di Kecamatan Selimbau dan Kecamatan Jongkong.

Sebagaiman dengan wawancara peneliti dengan bapak Alpian (pengolah) mengatakan bahwa:

“Kebutuhan akan bahan baku tepung terigu dan tapioka sangatlah banyak, tapi harganya semakin hari semakin naik. Hal ini yang mempengaruhi harga beli masyarakat semakin menurun, jadi hal itu juga yang membuat pengolah tidak bisa maksimal dalam melakukan produksi kerupuk ikan. Permasalahan yang dihadapi pengolah adalah mereka membeli

bahan baku mahal, sedangkan harga jual produk mereka tidak terlalu banyak mengalami kenaikan. Sehingga mereka mengurangi jumlah produksi, karena apabila mereka memproduksi kerupuk banyak mereka takut produknya lama tidak terjual”.

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang diperlukan dalam pembuatan kerupuk tidak memerlukan keahlian khusus. Dalam hal ini tenaga kerja pria dan wanita dapat dipekerjakan pada semua tahap pembuatan. Akan tetapi tenaga kerja laki-laki sebagian besar ditempatkan pada proses penyiapan bahan, pencetakan, pengukusan, dan pemotongan sedangkan tenaga kerja wanita banyak digunakan pada tahap pemotongan, penjemuran dan pengepakan. Selain tenaga kerja tetap, terkadang diperlukan tenaga kerja borongan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan pesanan atau pada musim kemarau dimana proses produksi meningkat.

Sehubungan dengan tenaga kerja, berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Fajarudin (pengolah) mengatakan:

“Bahwa dalam melakukan pengolahan kerupuk ikan tidak memerlukan tenaga kerja yang dengan kemampuan khusus, hal ini disebabkan karena peralatan yang digunakan masih tradisional”.

Padahal menurut Heidjrahman dan Husnan (dalam nono sampono 2007: 67) salah satu syarat agar suatu usaha memberikan hasil produksi yang baik adalah tenaga kerja yang memiliki mutu yang baik.

5. Teknologi

Dalam usaha pembuatan kerupuk ikan dapat menggunakan teknologi tradisional ataupun teknologi modern. Perbedaan

teknologi ini berkaitan dengan jenis peralatan yang digunakan selama proses produksi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan teknologi yang digunakan oleh pengolah desa piasak masih menggunakan teknologi sederhana. Peralatan yang digunakan pada teknologi ini mudah diperoleh sebab merupakan peralatan yang sering dipakai dalam rumah tangga pada umumnya. Selain alat, tenaga kerja merupakan faktor utama dalam hasil produksi kerupuk, sebab beberapa proses dari produksi ini mengandalkan tenaga manusia.

Sehubungan dengan teknologi pengolahan kerupuk ikan di Desa Piasak Bapak Alpian (pengolah) mengatakan:

“Bahwa Penggunaan peralatan sederhana ini sangat mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan dan mutu. Dengan hanya menggunakan teknologi tradisional ini terkadang hanya dapat menghasilkan 1 (satu) kali adonan. Kapasitas produksi dengan alat sederhana ini sangat kecil dengan mutu yang kurang baik”.

Pembuatan kerupuk dengan teknologi modern adalah proses dengan menggunakan peralatan yang lebih modern seperti mesin cetak otomatis yang menghasilkan bentuk yang lebih variatif, mesin pemotong yang lebih cepat dan penggunaan oven. Penggunaan teknologi ini dapat menghasilkan jumlah produksi yang berlipat-lipat jika dibandingkan dengan teknologi sederhana. Dalam satu hari dapat dilakukan 3-4 kali adonan kerupuk. Selain itu dengan teknologi ini akan menghemat jumlah tenaga kerja yang digunakan yang akan menurunkan biaya operasional.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Proses pemberian bantuan peralatan pengolahan di Desa Piasak pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, dimana pada proses pemberian bantuan peralatan telah melalui berbagai tahapan. Adapun tahapan proses pemberian bantuan peralatan pengolahan di Desa Piasak adalah: tahap Pra-Implementasi, tahap Implementasi dan tahap Pasca-Implementasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hasil pemanfaatan bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan di Desa Piasak adalah: Fasilitas Produksi, Peralatan, Bahan Baku, Tenaga Kerja dan Teknologi. Akan tetapi faktor yang paling berpengaruh terhadap efektifitas pemanfaatan peralatan adalah ketersediaan dari bahan baku. Bahan baku yang sangat berpengaruh terdiri dari dua macam yaitu bahan baku ikan dan bahan baku tepung tapioka.

B. SARAN

1. Berkaitan dengan peningkatan produksi kerupuk ikan di Desa Piasak hendaknya instansi yang terkait dapat memenuhi kebutuhan peralatan yang dibutuhkan oleh kelompok pengolah seperti memberikan peralatan untuk penyimpanan bahan baku agar pada saat musim panen masyarakat dapat menyetok bahan baku.

2. Pemerintah harus menstabilkan harga bahan baku tepung ditingkat pengolah, saran penulis supaya Pengolah diberikan subsidi dalam pembelian bahan baku tepung tapioka. Untuk mengatasi kekurangan bahan baku ikan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan harus membuat program Pengembangan Kawasan Budidaya di Desa Piasak Kecamatan Selimbau.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 2012. *Data Pokok 2012 Kabupaten Kapuas Hulu*. Putussibau. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. 2012. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012*.
- Balai Informasi Pertanian Kalimantan Selatan. (1995). *Pembuatan Kerupuk Ikan Lundu*. Banjar Baru. Departemen Pertanian.
- Departemen Pertanian. (1989). *Pembuatan Kerupuk Ikan dan Udang*. Palangka Raya. Departemen Pertanian.
- Eddy Afrianto dan Evi Liviawaty. (1989). *Pengawetan dan Pengolahan Ikan*. Yogyakarta. Kanisius.
- Gulo,W. (2002), *Metodolologi Penelitian*, Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Islamy, M, Irfan.(2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Irawan Prasetya.(2007). *Metodolgi Penelitian Administarsi*.Jakarta :Universitas Terbuka.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2012). *Statistika Ekspor Hasil Indonesia*. Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Laporan Data Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012.
- Nugroho, D,Riant. (2003) . *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Rencana Strategis (RenStra) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015.
- Robins, S.P. (2001). *Prilaku Organisasi (Konsep Konversi, Aplikasi)* Jakarta :PT. Prenhalindo.

- Soenarko. (2000). *Public Policy : Pengertian-pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Sudarmayanti. (2001). *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suhardi, Suhardjo, Yuniarti, F. Kasijadi, W. Istuti, A. Budijono, Jumadi dan Bonimin. 2006. *Pengkajian Inovasi Teknologi Pengolahan*. <http://www.Litbang.Deptan.Go.id>.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward*. Penerbit Lukman & Yayasan Pembauran Administrasi Publik Indonesia Jakarta
- Winarno. (2002). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressind
- Wahab. (2001). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Med Press.



Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

BANTUAN PERALATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN TERHADAP PRODUKSI KERUPUK IKAN PADA SENTRA PENGOLAHAN DI DESA PIASAK KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR PERTANYAAN

- 1. Proses Pemberian Bantuan Peralatan Pengolahan di Desa Piasak**
 - a. Apakah pemberian bantuan peralatan pengolahan berdasarkan permintaan/kebutuhan masyarakat?
 - b. Apakah terjalin komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perikanan, pihak Desa Piasak dan kelompok pengolah?
 - c. Apakah sebelum diberikan bantuan ada dilakukan identifikasi lokasi dan identifikasi kelompok?
 - d. Apakah sebelum pemberian bantuan ada dilakukan sosialisasi dengan masyarakat di Desa Piasak?
 - e. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan peralatan di Desa Piasak?
 - f. Apakah SDM (aparatur) sudah cukup dan sesuai dengan keahlian?
 - g. Apakah ada pembinaan terhadap kelompok yang mendapat bantuan?
 - h. Apakah ada evaluasi dari Dinas Perikanan terhadap bantuan yang diberikan?
 - i. Apakah ada penambahan tenaga kerja pada kelompok Saudara setelah menerima bantuan peralatan pengolahan?
 - j. Bagaimana kondisi lingkungan tempat pengolahan kerupuk setelah kelompok menerima bantuan peralatan pengolahan?
 - k. Bagaimana kondisi produksi kerupuk setelah kelompok saudara menerima bantuan peralatan pengolahan?
 - l. Bagaimanakah kualitas produksi kerupuk ikan di Desa Piasak setelah kelompok menerima paket bantuan peralatan bantuan?

- 2. Faktor yang mempengaruhi efektifitas pemanfaatan peralatan bantuan di Desa Piasak**
 - a. Apakah fasilitas bangunan untuk produksi sudah mendukung dengan adanya bantuan peralatan pengolahan terhadap kelompok saudara?
 - b. Bagaimana keadaan lahan untuk penjemuran kerupuk ikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Piasak?
 - c. Peralatan pengolahan yang digunakan oleh pengolah kerupuk ikan di Desa Piasak apakah sudah modern?
 - d. Barapa macam peralatan yang diberikan oleh Dinas Perikanan kepada kelompok yang ada di Desa Piasak?

- e. Apakah bantuan peralatan pengolahan yang kelompok terima sangat membantu dalam proses produksi kerupuk ikan di Desa Piasak?
- f. Apakah dengan adanya bantuan peralatan pengolahan ada kendala dengan bahan baku ikan?
- g. Bagaimana tingkat kebutuhan bahan baku tepung tapioka setelah adanya bantuan peralatan pengolahan?
- h. Apakah dengan adanya bantuan peralatan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu pengolah memerlukan tenaga kerja dengan kemampuan khusus?
- i. Teknologi yang bagaimana digunakan oleh pengolah kerupuk ikan di Desa Piasak dalam melakukan produksi?



Lampiran 2.

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Proses Pemberian Bantuan Peralatan Pengolahan di Desa Piasak

- a. Apakah pemberian bantuan peralatan pengolahan berdasarkan permintaan/kebutuhan masyarakat?

Jawab: Keinginan untuk menjadikan Desa Piasak sebagai sentra pengolahan kerupuk ikan ini adalah didasari dari keinginan masyarakat sendiri untuk memajukan daerah serta didukung juga oleh program dari Pemerintah, yang dalam hal ini sebagai instansi teknis adalah Dinas Perikanan. Permohonan kami langsung direspon positif oleh pihak Dinas Perikanan, dimana pada saat itu Kepala Dinas lagi dijabat oleh Bapak Drs. Abang Chairul Saleh, MM. Jadi pemerintah dalam memberikan bantuan peralatan memang atas usulan dan kebutuhan masyarakat Desa Piasak. Sumber: Bapak Ismail (mantan Kades Piasak).

- b. Apakah terjalin komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perikanan, pihak Desa Piasak dan kelompok pengolah?

Jawab: Sehubungan dengan komunikasi antara Dinas Perikanan, Pihak Desa Piasak serta dengan kelompok pengolah kerupuk terjalin dengan baik. Baik itu komunikasi langsung maupun tidak langsung, komunikasi langsung yang kami maksudkan adalah kami ketemu langsung dengan pihak Dinas Perikanan. Dimana mereka sebelum menyalurkan bantuan selalu memberitahu terlebih dahulu kepada kami dengan cara mengumpul pihak Desa dan perwakilan dari masing-masing kelompok. Sedangkan komunikasi tidak langsung yang kami maksudkan adalah mereka memberitahu kami lewat komunikasi jarak jauh, yaitu komunikasi melalui hendpon. Sumber: Bapak Basrun (Kades Piasak).

- c. Apakah sebelum diberikan bantuan ada dilakukan identifikasi lokasi dan identifikasi kelompok?

Jawab: Bahwa sebelum penentuan lokasi dan pemberian bantuan di Desa Piasak terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap lokasi dan kebutuhan peralatan yang dibutuhkan oleh kelompok pengolah, sehingga pada saat penganggaran sudah tergambarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kelompok pengolah. Sumber: Ir. Istiwa, M.Si (mantan Kabid Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan).

- d. Apakah sebelum pemberian bantuan ada dilakukan sosialisasi dengan masyarakat di Desa Piasak?

Jawab: Bahwa sebelum dilaksanakan Pemberian bantuan peralatan pengolahan sangat perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi, sosialisasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terlibat baik langsung atau tidak dalam proses pelaksanaan

pendataan, lebih jauh beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan dengan melaksanakan pertemuan tatap muka antara Pihak Dinas Perikanan, Pihak Desa Piasak dan Pihak Kelompok yang akan jadi sasaran program kegiatan pemberian bantuan.

- e. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan peralatan di Desa Piasak?

Jawab: dari aspek pembagian sudah berjalan baik, ini ditandai dengan setiap pengolah sudah mendapatkan jatah masing-masing alat berupa dandang dan kual pengukus kerupuk ikan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa peralatan yang dibantu kepada kelompok masih ada yang belum maksimal seperti peralatan penyimpanan bahan baku ikan yaitu peralatan Freezer (kulkas pembeku). Peralatan Freezer (kulkas pembeku) yang telah diberikan kepada kelompok baru berjumlah 40 (empat puluh) unit, sedangkan idealnya setiap pengolah memiliki minimal 1 (satu) buah freezer.

- f. Apakah SDM (aparatur) sudah cukup dan sesuai dengan keahlian?

Jawab: Bahwa sumber daya manusia (aparatur) yang ada di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memang kurang, tetapi menurut saya itu tidaklah menjadi kendala untuk kami dapat berbuat dalam menjalankan tugas. Saat ini di bidang Pengolahan dan pemasaran kami memiliki personil 8 (delapan) orang, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasi, dan 5 (lima) orang staf. Sedangkan staf PNS yang kami miliki hanya 1 (satu) orang, sedangkan yang 4 (empat) orang adalah staf honorer. Sumber: Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

- g. Apakah ada pembinaan terhadap kelompok yang mendapat bantuan?

Jawab: Pembinaan ini biasanya dilakukan oleh tim pembina dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dihadiri hampir seluruh pengolah kerupuk ikan di Desa Piasak. Dalam satu tahun pembinaan dan evaluasi di Desa Piasak biasanya dilakukan paling kurang tiga kali dalam satu tahun, dalam pembinaan ini yang diangkat yaitu mengenai evaluasi terhadap produksi, perbaikan mutu kemasan produk, pelarangan penggunaan produk-produk berbahaya, rencana-rencana aksi lainnya dalam kegiatan peningkatan produksi serta mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sumber: Kasi Pengolahan Hasil Perikanan.

- h. Apakah ada evaluasi dari Dinas Perikanan terhadap bantuan yang diberikan?

Jawab: ada

- i. Apakah ada penambahan tenaga kerja pada kelompok Saudara setelah menerima bantuan peralatan pengolahan?

Jawab: Bahwa dengan adanya bantuan peralatan dari pemerintah ada sebagian kelompok memerlukan penambahan tenaga kerja harian, hal ini

disebabkan adanya penambahan peralatan. Jumlah penambahan tenaga kerja harian biasanya antara satu atau dua orang, tapi ada juga yang tidak. Hal ini dipengaruhi tergantung produksi, bila produksinya banyak maka seorang pengolah tidak dapat bekerja sendirian maka ia memerlukan penambahan tenaga yang dapat membantunya. Sumber: Bapak Alpian

- j. Bagaimana kondisi lingkungan tempat pengolahan kerupuk setelah kelompok menerima bantuan peralatan pengolahan?

Jawab: Bahwa lingkungan tempat mengolah kerupuk ikan selalu terjaga dengan baik, hal ini disebabkan karena pada umumnya mereka masih mengolah kerupuk ikan ditempat tinggal mereka masing-masing. Bangunan yang dibangun oleh pemerintah untuk dijadikan sentra pengolahan belum memadai, karena belum cukup untuk menampung semua pengolah untuk dipindahkan kelokasi sentra. Sumber: Bapak Alpian.

- k. Bagaimana kondisi produksi kerupuk setelah kelompok saudara menerima bantuan peralatan pengolahan?

Jawab: Bahwa produksi kerupuk ikan di Desa Piasak mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya hasil tangkapan ikan di alam. Sehubungan dengan produksi ini juga ada kaitannya juga dengan wadah penyimpanan bahan baku yang dimiliki olah pengolah yang belum memadai. Sebenarnya masalah produksi ini dapat di atasi apabila semua pengolah memiliki wadah penyimpanan bahan baku berupa freezer. Dimana kalau pengolah memiliki peralatan penampung, maka mereka dapat menyetok bahan baku dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga pada musim ikan kurang mereka masih tetap memiliki bahan baku untuk produksi kerupuk.

- i. Bagaimanakah kualitas kemasan produk kerupuk ikan di Desa Piasak setelah kelompok menerima paket bantuan peralatan bantuan?

Jawab: Kualitas Produk kerupuk ikan yang ada di Desa Piasak menjadi agak lebih baik dari segi pengemasannya, hal ini dikarenakan adanya bantuan peralatan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu. Dimana pada saat dulu masyarakat hanya membungkus kerupuk ikan dengan kantong plastik biasa yang mana hanya dengan mengikat bagian ujungnya. Tapi sekarang kami sebagai pengolah tidak banyak yang menggunakan kemasan yang model bungkus biasa, kami sudah bisa menggunakan Hand Sealer sebagai perekat bungkus kemasan. Hand sealer ini bantuan dari Dinas Perikanan, tiap kelompok kami sudah mendapatkan masing-masing ada 3 (tiga) buah Hand Sealer. Bantuan ini sangat membantu kami dalam melakukan pengemasan produk kerupuk ikan di Desa Piasak.

2. Faktor yang mempengaruhi efektifitas pemanfaatan peralatan bantuan di Desa Piasak

- a. Apakah fasilitas bangunan untuk produksi sudah mendukung dengan adanya bantuan peralatan pengolahan terhadap kelompok saudara?

Jawab: Masyarakat pengolah masih belum memiliki bangunan khusus untuk melakukan pengolahan secara terpadu, selama ini masyarakat masih menggunakan fasilitas bangunan rumah tinggal untuk melakukan produksi kerupuk ikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan masyarakat untuk membangun bangunan untuk produksi yang sesuai dengan standar. Sumber: Bapak Mahroni (Pengolah).

- b. Bagaimana keadaan lahan untuk penjemuran kerupuk ikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Piasak?

Jawab: Fasilitas untuk menjemur kerupuk yang ada di Desa Piasak sangat minim, dimana masyarakat pengolah masih banyak menjemur kerupuk mereka di jalanan. Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu pernah membangun lantai jemur untuk masyarakat pengolah sebanyak 3 unit, tetapi bantuan pemerintah tersebut belum mampu untuk menampung produksi yang ada di Desa Piasak. Sumber: bapak Alpian.

- c. Peralatan pengolahan yang digunakan oleh pengolah kerupuk ikan di Desa Piasak apakah sudah modern?

Jawab: Bahwa masyarakat pengolah kerupuk ikan di Desa Piasak masih menggunakan peralatan sederhana, peralatan dengan teknologi modern belum ada yang digunakan oleh masyarakat pengolah di Desa Piasak. Sumber: bapak Alpian.

- d. Barapa macam peralatan yang diberikan oleh Dinas Perikanan kepada kelompok yang ada di Desa Piasak?

Jawab: Bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu telah menyalurkan bantuan kepada kelompok pengolah hasil perikanan di Desa Piasak berupa peralatan seperti: Kualii, Dandang, hend seller, freezer dan mesin penggiling ikan. Sumber: Kasi Pengolahan hasil perikanan.

- e. Apakah bantuan peralatan pengolahan yang kelompok terima sangat membantu dalam proses produksi kerupuk ikan di Desa Piasak?

Jawab: Bahwa bantuan peralatan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sangatlah membantu masyarakat pengolah dalam melakukan produksi kerupuk mereka terutama pada bantuan kualii dan dandang pengukus kerupuk, tetapi mereka masih ada mengalami kesulitan dalam penyimpanan bahan baku ikan. Karena tidak semua pengolah memiliki freezer, dalam melakukan pengolahan kerupuk ikan, freezer merupakan peralatan yang sangat diperlukan oleh pengolah. Dimana bahan baku ikan tersebut yang mudah mengalami kerusakan mutu daging ikan kalau tidak disimpan ditempat yang dingin. Idealnya satu pengolah minimal memiliki 1 (satu) buah

freezer, supaya pada musim tangkapan ikan banyak mereka dapat menyetok bahan baku ikan. Sumber: bapak Fajarudin.

- f. Apakah dengan adanya bantuan peralatan pengolahan ada kendala dengan bahan baku ikan?

Jawab: Bahwa pada musim tangkapan ikan banyak pengolah tidak mengalami kesulitan bahan baku ikan, tapi apabila pada musim tangkapan ikan berkurang maka pengolah akan kesulitan juga untuk mendapatkan bahan baku ikan. Hal ini disebabkan masyarakat masih mengandalkan bahan baku dari hasil tangkapan dari alam. Hasil dari budidaya belum mampu menutupi kebutuhan akan bahan baku ikan pada saat hasil tangkapan berkurang. Sumber: bapak Ujang sah dani.

- g. Bagaimana tingkat kebutuhan bahan baku tepung tapioka setelah adanya bantuan peralatan pengolahan?

Jawab: Kebutuhan akan bahan baku tepung terigu dan tapioka sangatlah banyak, tapi harganya semakin hari semakin naik. Hal ini yang mempengaruhi harga beli masyarakat semakin menurun, jadi hal itu juga yang membuat pengolah tidak bisa maksimal dalam melakukan produksi kerupuk ikan. Permasalahan yang dihadapi pengolah adalah mereka membeli bahan baku mahal, sedangkan harga jual produk mereka tidak terlalu banyak mengalami kenaikan. Sehingga mereka mengurangi jumlah produksi, karena apabila mereka memproduksi kerupuk banyak mereka takut produknya lama tidak terjual. Sumber: bapak Alpian.

- h. Apakah dengan adanya bantuan peralatan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu pengolah memerlukan tenaga kerja dengan kemampuan khusus?

Jawab: Bahwa dalam melakukan pengolahan kerupuk ikan tidak memerlukan tenaga kerja yang dengan kemampuan khusus, hal ini disebabkan karena peralatan yang digunakan masih tradisional. Sumber: bapak Fajarudin.

- i. Teknologi yang bagaimana digunakan oleh pengolah kerupuk ikan di Desa Piasak dalam melakukan produksi?

Jawab: Bahwa Penggunaan peralatan sederhana ini sangat mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan dan mutu. Dengan hanya menggunakan teknologi tradisional terkadang hanya dapat menghasilkan 1 (satu) kali adonan. Kapasitas produksi dengan alat sederhana ini sangat kecil dengan mutu yang kurang baik. Sumber: bapak Alpian.

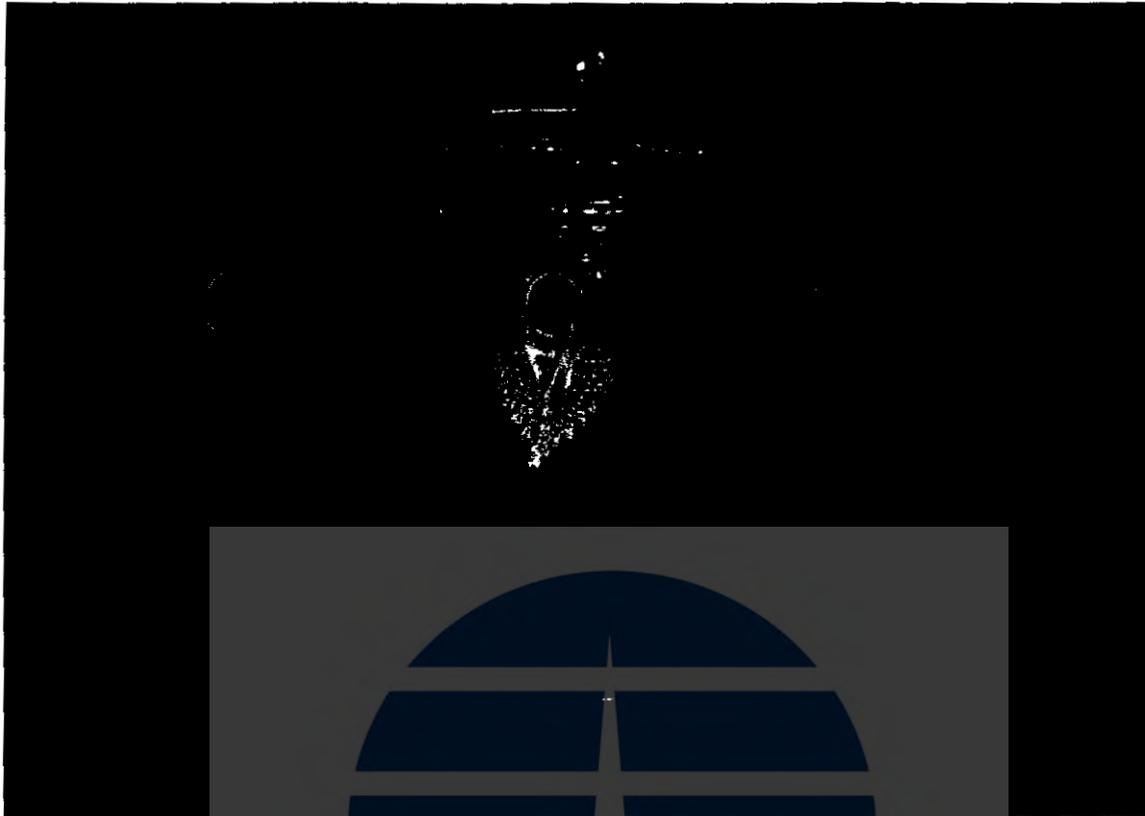
Lampiran 3. Dokumentasi Proses Pemberian bantuan Peralatan Pengolahan dan Dokumentasi
Kegiatan Pengumpulan data Penelitian



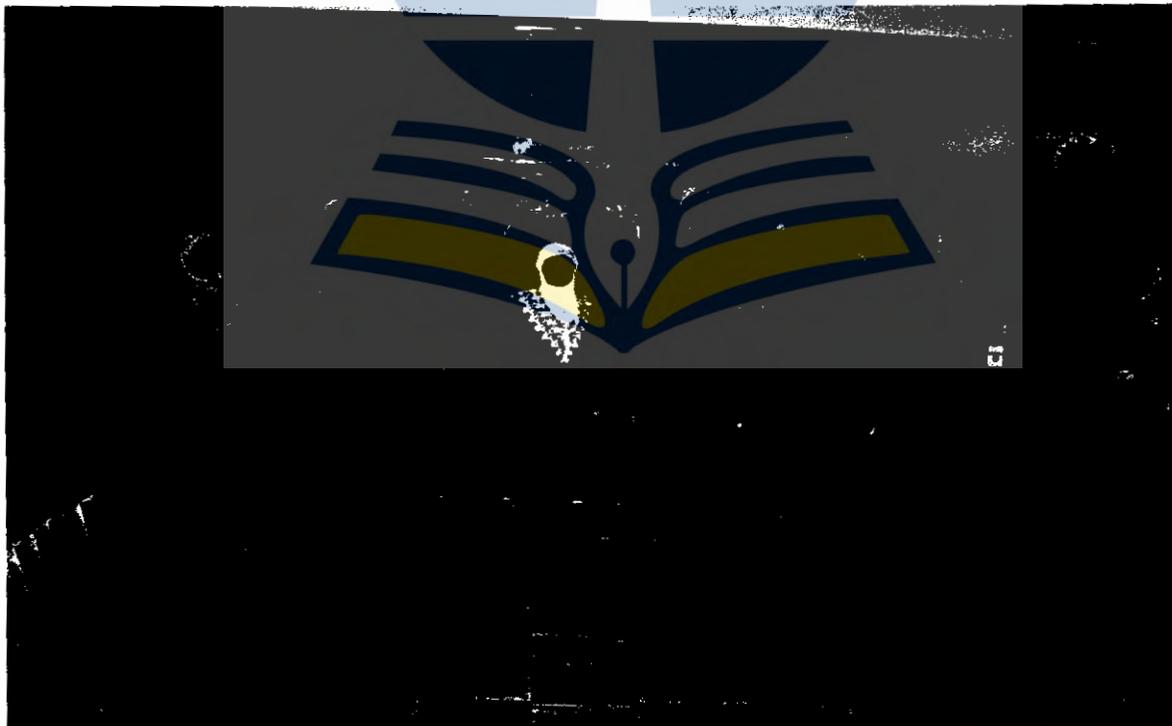
Survey rencana lokasi pembangunan sentra pengolahan hasil perikanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Piasak beserta tim dari Dinas Perikanan Tahun 2008



Suasan acara sosialisasi oleh tim Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2008



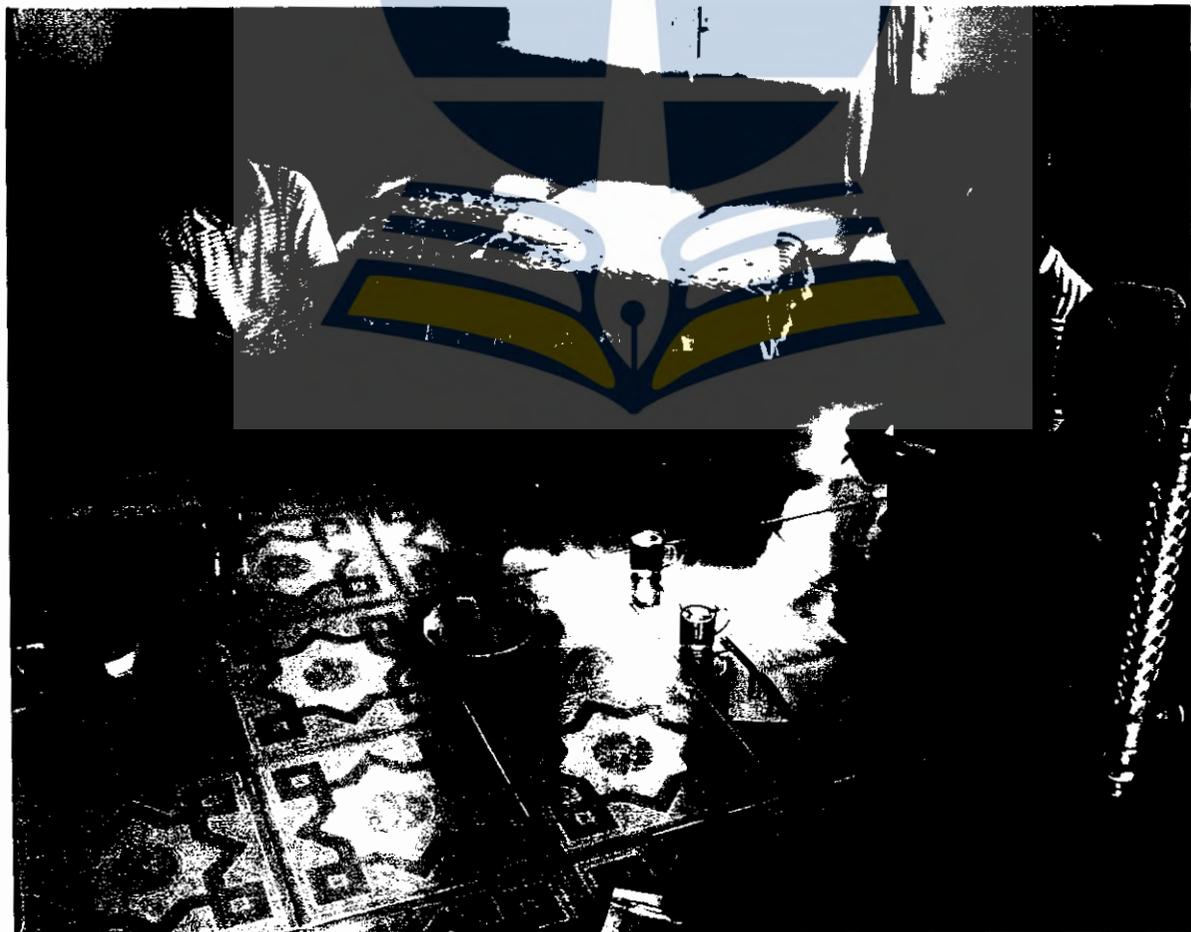
Sosialisasi produk dan mutu olahan perikanan
Tahun 2010



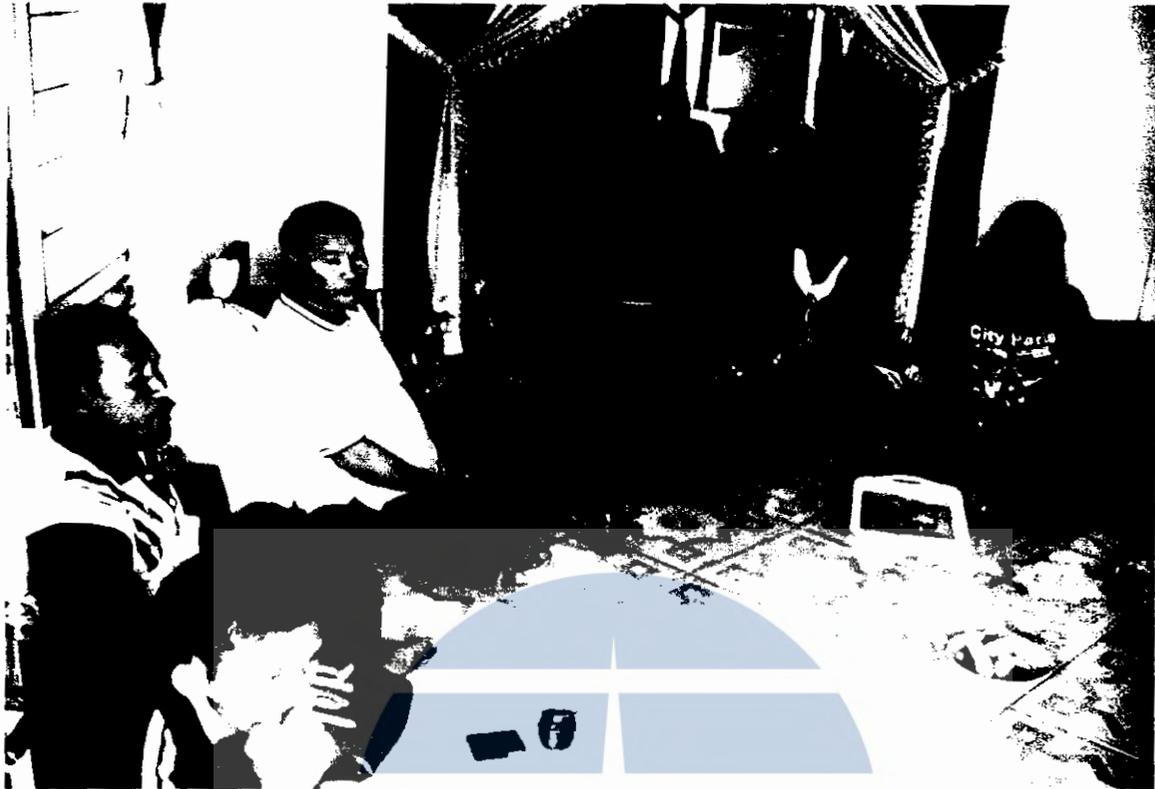
Bimbingan teknis sentra pengolahan hasil perikanan
Tahun 2010



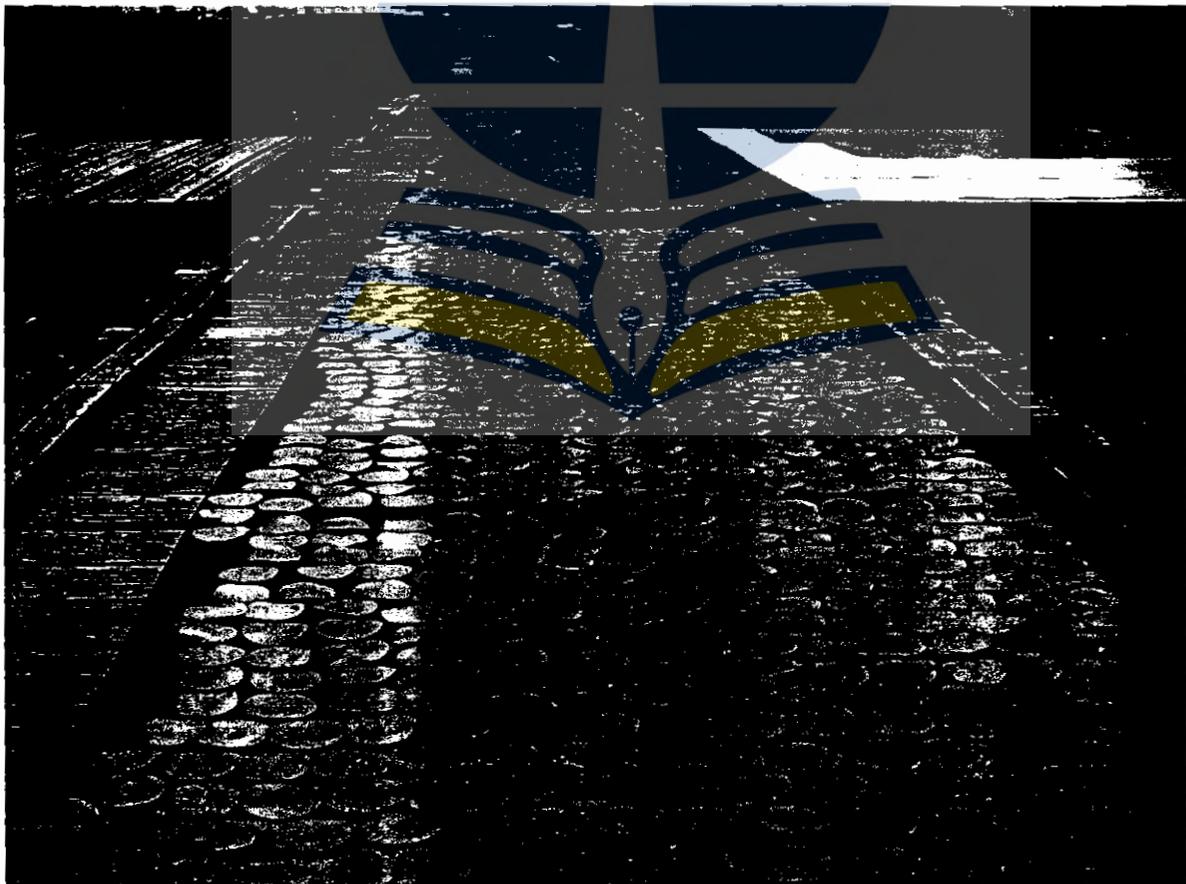
Serah terima Peralatan pengolahan dari dinas perikanan



Suasana peneliti dalam mewawancarai pengolah



Pengumpulan data penelitian di Desa Piasak



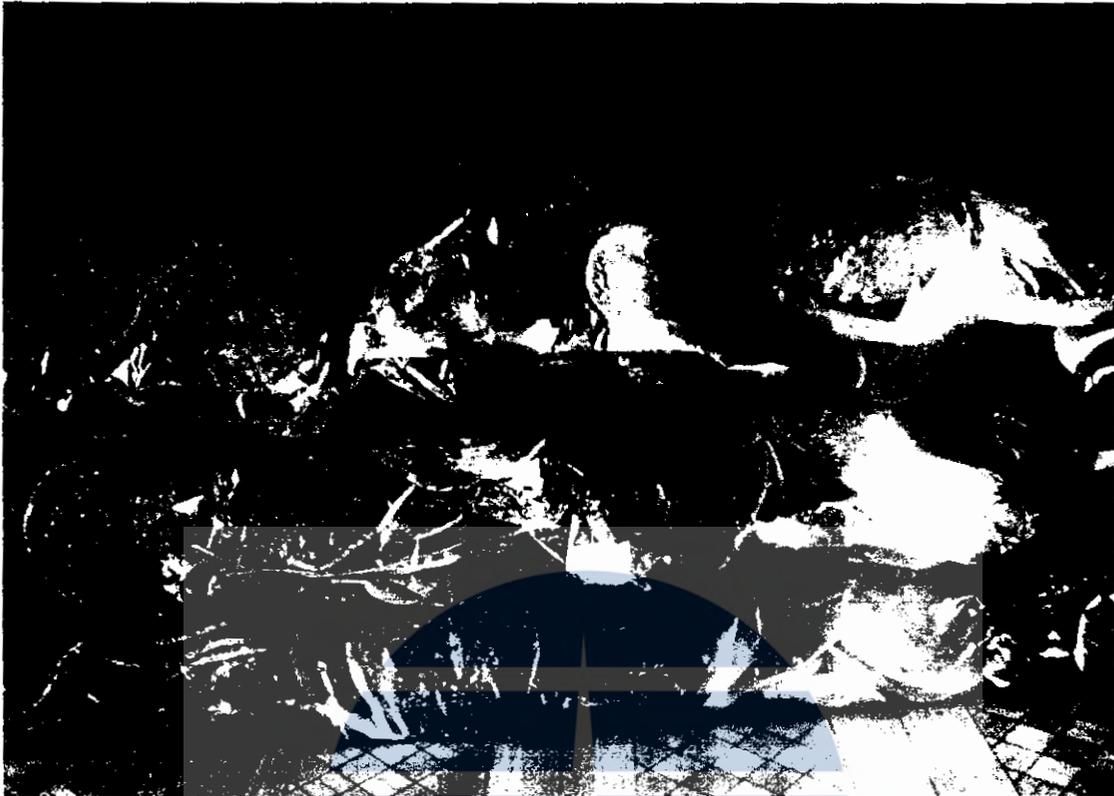
Penjemuran kerupuk ikan dijalanan umum



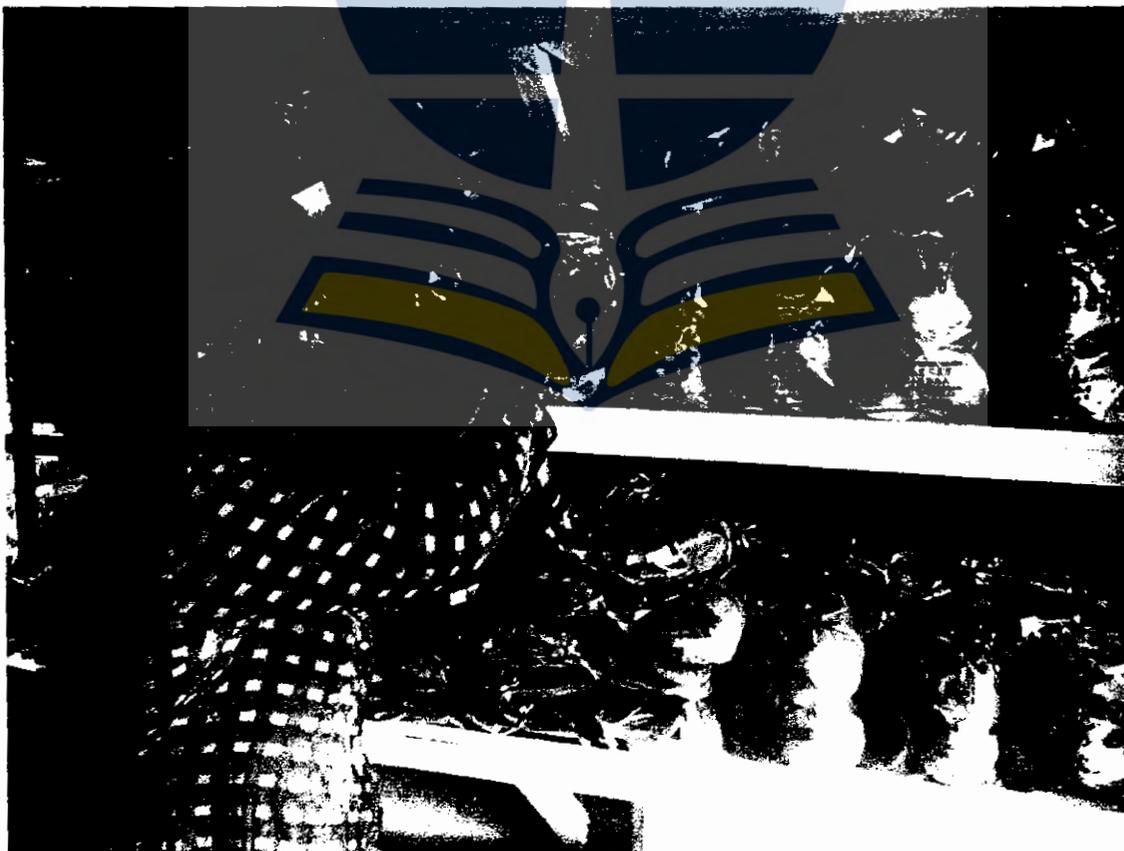
Sentra pengolahan hasil perikanan yang belum termanfaatkan



Lantai jemur bantuan Dinas Perikanan



Contoh kerupuk hasil produksi masyarakat Desa Piasak dengan kemasan biasa



Contoh produksi kerupuk ikan Desa Piasak dengan kemasan yang agak menarik



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pontianak

Jl. Karya Bakti, Pontianak 78121

Telepon: 0561-736107, 730291, 760791, Faksimile: 0561-736107

Laman : ut-pontianak@ut.ac.id

Nomor : 0199 /UN31.43/LL/2013.
Lampiran : _____
Perihal : Ijin Penelitian TAPM MAPU 5400

Yth. Kepala Desa Piasak Kecamatan Selimbau
Kabupaten KAPUAS HULU

Kasubbag Tata Usaha atas nama Kepala Unit Program Belajar Jarak jauh Universitas
Terbuka Pontianak menerangkan dengan sesungguhnya, di Bawah ini :

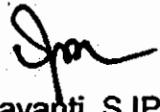
No.	Nama	NIM	Kode Mata Kuliah/ Mata Kuliah
01	Sukiman	016759368	MAPU 5400 (Tugas Akhir Program)

Bermaksud akan melaksanakan pengumpulan data awal penelitian Tugas Akhir
Program Magister (TAPM), di instusi yang Bapak/Ibu pimpin dengan Judul "
Hubungan Kebijakan Pemerintah dengan Pemasaran Kerupuk Ikan Hasil Home
Industri terhadap Pendapat Nelayan di Desa Piasak "

kerjasama dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Pontianak, 18 Pebruari 2013

An. Kepala ,
Kasubbag. Tata Usaha ,


Ramayanti, S.IP.
NIP- 19660514 198803 2 001

Tembusan, yth :
- Kepala UPBJJ-UT Pontianak



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 280 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KHUSUS (LOKUS) SENTRA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lokasi Khusus (Lokus) Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Bidang Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, memerlukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
 - b. bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan dalam upaya menumbuhkembangkan sentra pengolahan hasil perikanan serta upaya pengembangan mikro, kecil menengah dan besar dalam suatu kawasan industri pengolahan ikan, sejalan dengan perkembangan yang terjadi, perlu menetapkan Lokasi Khusus (Lokus) Sentra Pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Nomor : KEP.08/DJ-P2HP2009 tanggal, 5 Januari 2009 Tentang Penambahan Lokasi Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Lokasi Khusus (Lokus) Sentra Pengolahan Hasil Perikanan.
- KEDUA :** Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Desa Piasak Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 8 Nopember 2010



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
Up. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Camat tempat Lokasi Khusus (Lokus) Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;



GRAND DESAIN

SENTRA PENGOLAHAN KERUPUK



DESA PIASAK KECAMATAN SELIMBAU

KABUPATEN KAPUAS HULU